LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

TAHUN 2023

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu untuk tahun 2023 ini, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun (LKjIP berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP tahun 2023 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2023, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya LKjIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini. Mudah-mudahan dengan LKjIP ini menjadikan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Kepala Dinas,

A.M. FITRA FIRNANDA,S.T,M.M
NIP. 19740405 200003 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi 1
1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 1
1.3 Struktur Organisasi 3
1.4 Sumber Daya Manusia 5
1.5 Aspek Strategis Organisasi 6
1.6 Permasalahan Utama (Isu Strategis) 7
1.7 Sarana dan Prasarana Kerja 27

BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Strategis 28
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 45
2.2 Indikator Kinerja Utama 46
2.3. Perjanjian Kinerja 48

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP 54
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 57
3.3 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
Serta Permasalahan dan Solusi 61
3.4 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya 82
3.5 Realisasi Anggaran 83
1. Laporan Realisasi anggaran 92
2. Anggaran dan Realisasi Program 93

BAB IV PENUTUP
Kesimpulan 99

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas PUPR dan PERA Prov.Kaltim 2023.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Data Pegawai Pejabat Eselon Berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2023 5
Tabel 2. Data Rekapitulasi pegawai Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2023 5
Tabel 3. Data Rekapitulasi Pejabat Struktural Berdasarkan Pendidikan 6
Tabel 4. Pemetaan Permasalahan Pembangunan pada RPJMD 8
Tabel 5. Pemetaan Permasalahan DPUPR & PERA Prov Kaltim 19
Tabel 6. Sarana dan Prasarana Kerja 27
Tabel 7. Rumusan misi,tujuan,sasaran dan indikator perubahan RPJMD 33
Tabel 8. Tujuan,sasaran,strategis kebijakan P-Renstra DPUPR & PERA 37
Tabel 9. Keterkaitan antara sasaran strategi dan program 38
Tabel 10. Keterkaitan tujuan-sasaran & strategi arah kebijakan serta program 40
Tabel 11. Keterkaitan tujuan-sasaran serta program & kegiatan 43
Tabel 12. Rencana Kinerja Tahunan 45
Tabel 13. Indikator Kinerja Utama 46
Tabel 14. Perjanjian Kinerja 2023 48
Tabel 15. Target Belanja 49
Tabel 16. Alokasi Anggaran 53
Tabel 17. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 54
Tabel 18. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 54
Tabel 19. Pengukuran Capaian Kinerja per triwulan 58
Tabel 20. Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2023 61
Tabel 21. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 62
Tabel 22. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 64
Tabel 23. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3 65
Tabel 24. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4 67
Tabel 25. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5 76
Tabel 26. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6 78
Tabel 27. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7 80
Tabel 28. Analisis efisiensi Penggunaan sumber Daya 82
Tabel 29. Effisiensi penggunaan anggaran 83
Tabel 30. Laporan Realisasi Anggaran 92
Tabel 31. Anggaran dan Realisasi Program APBD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 93
Tabel 32. Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 97

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim 4

Gambar 2. Analisis Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim 10

Gambar 3. Visi & Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan (selanjutnya disebut DPUPR-PERA Prov. Kaltim) dibentuk berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DPUPR-PERA Prov. Kaltim merupakan lembaga teknis daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun tugas dan fungsi DPUPR-PERA Prov. Kaltim adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan permukiman;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan permukiman;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sumber daya air;

e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bina marga;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang cipta karya;
g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bina konstruksi
h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penataan ruang;
i. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perumahan dan permukiman;
j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
k. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
l. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Melihat fungsi dan tugas di atas, dalam pelaksanaan kinerjanya, DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh manajemen dengan struktur organisasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Subbagian Umum;
   b. Subbagian Perencanaan Program
3. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Bina Marga;
   b. Seksi Jalan;
4. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
   b. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan;

5. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Sumber Daya air;
   b. Seksi Irigasi dan Rawa;
6. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
   b. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
7. Bidang Perumahan dan Permukiman:
8. Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari:
   a. Seksi Pengkajian Usaha Jasa Konstruksi;
   b. Seksi Pemberdayaan Informasi dan Jasa Konstruksi;
9. Unit Pelaksana Teknik Dinas :
   a. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
   b. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
   c. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
   d. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Adapun Susunan 0rganisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang & Perumahan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

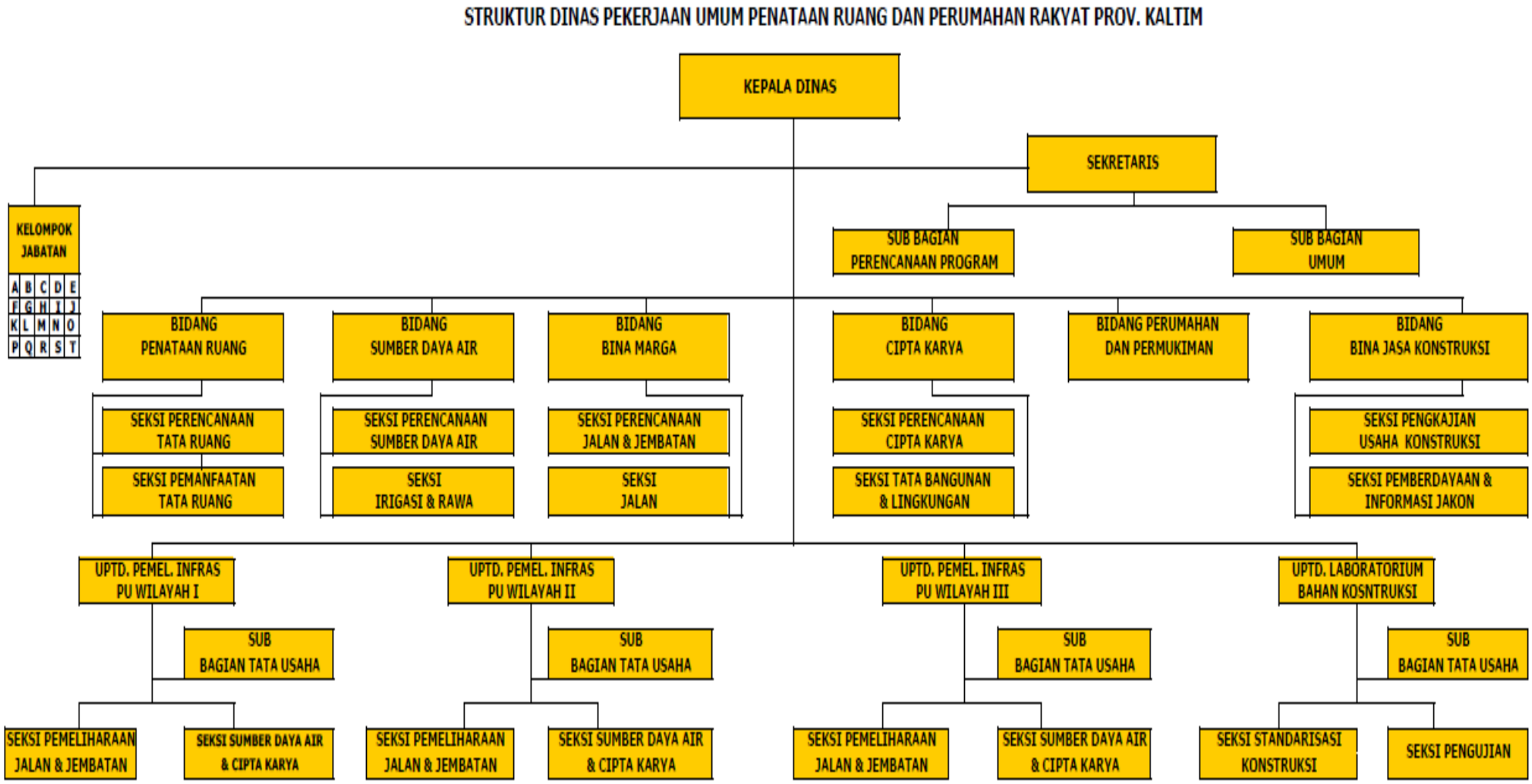

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas PU Prov. Kaltim per 31 Desember 2023

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya manusia per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 313 orang yang diklasifikasikan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta data pejabat struktural Tahun 2023.

Adapun rincian sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pegawai Pejabat Eselon Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	9	2	11
3.	Eselon IV	20	4	24
4.	Fungsional	12	7	19
4.	Pelaksana	174	61	235
TOTAL		***216***	***74***	***290***

Sumber : Data kepegawaian DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

BIDANG.	GOLONGAN			
	I	II	III	IV
Sekretariat	1	11	25	4
Penataan Ruang	-	-	10	-
Bina Konstruksi	-	5	5	3
Sumber Daya Air	1	2	16	2
Bina Marga	1	14	43	4
Cipta Karya	1	5	12	1
Perumahan dan Permukiman	0	6	10	2
UPTD Lab Bahan Konstruksi	-	6	11	1
UPTD Wilayah I	-	11	19	2
UPTD Wilayah II	4	11	10	4
UPTD Wilayah III	1	9	14	3
JUMLAH	**9**	**80**	**175**	**26**
TOTAL PNS 290 ORANG				

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN							
	SD	SLTP	SLTA	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3
Sekretariat	2	1	19	2	2	10	5	-
Penataan Ruang	-	-	1	2	-	4	3	-
Bina Konstruksi	-	-	6	-	-	4	3	-
Sumber Daya Air	-	2	5	1	-	9	4	-
Bina Marga	1	-	24	3	2	23	9	-
Cipta Karya	1	1	7	1	-	6	3	-
Perumahan dan Permukiman	-	1	4	1	-	8	4	-
UPTD Lab Bahan Konstruksi	-	-	7	1	1	7	2	-
UPTD Wilayah I	-	2	16	2	-	9	3	-
UPTD Wilayah II	4	-	16	1	-	3	5	-
UPTD Wilayah III	3	3	10	3	-	4	4	-
TOTAL	**11**	**10**	**115**	**17**	**5**	**87**	**45**	-
TOTAL PNS 290 ORANG								

1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Strategi pencapaian tujuan menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian hasil yang konsisten dengan Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan

pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan dan Permukiman, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

1.6 PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah; khususnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu lima tahun. Pemetaan permasalahan pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif. Permasalahan pembangunan sarana prasarana pekerjaan umum dan perumahan rakyat menggambarkan kinerja perangkat daerah yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Dalam hal ini, agar dapat digunakan sebagai instrumen penting dalam mendefinisikan bagaimana DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur akan bertransformasi menjadi "Pelayan Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat" berkelas global maka analisis permasalahan dan isu strategis menjadi tahapan penting yang harus dipahami dengan baik untuk kemudian dijadikan dasar dalam menguraikan berbagai kebijakan strategik lima tahun mendatang.

Pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan dan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang baik menuju pusat produksi dan pemasaran serta kawasan strategis provinsi merupakan tuntutan masyarakat sekaligus termasuk dalam 6 (enam) permasalahan pokok pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaima tertuang dalam Perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yaitu: (1) Tingginya ketimpangan daya saing SDM; (2) Kesejahteraan belum terwujud secara adil dan merata; (3) Lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; (4) **Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar**; (5) Meningkatnya risiko penurunan kualitas lingkungan hidup; dan (6) Tata pemerintahan belum menghasilkan layanan dan kebijakan publik yang berorientasi pada kedaulatan masyarakat.

Belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas di Kalimantan Timur disebabkan karena rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar antara lain prasarana jalan, air bersih, sanitasi layak, perumahan dan permukiman yang

layak huni dan ketenagalistrikan. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta pada memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas di Kalimantan Timur. Ketersediaan perumahan yang layak huni, air baku dan air minum bersih, sera listrik, dan disertai dengan infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas perhubungan pelayaran, menjadi perhatian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termuat di dalam RTRW Kaltim, dikuatkan oleh infrastruktur yang optimal, menjadi denyut nadi tranformasi ekonomi hijau Kalimantan Timur.

Merujuk kepada hasil analisis permasalahan pembangunan daerah per-urusan pemerintahan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 maka terdapat berbagai permasalahan terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan dan kawasan pemukiman yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 4
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Pada P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Permasalahan Pokok 4. Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar		
	Rendahnya konektivitas antar wilayah dalam mendukung ekonomi kawasan	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Masih terdapat wilayah yang minim konektivitas dengan pusat kegiatan ekonomi
		Tingginya kerusakan fasilitas Jalan Provinsi
	Belum optimalnya pemerataan infrastruktur sumber daya air	Terbatasnya kapasitas air baku daerah
		Belum optimalnya distribusi air bersih ke masyarakat
		Belum optimalnya peningkatan kualitas DAS dan subsistemnya
	Belum optimalnya penanganan terhadap kawasan kumuh	Masih banyaknya penduduk miskin yang belum memiliki rumah layak huni
	Belum optimalnya infrastruktur pengendali bencana banjir	Belum optimalnya peningkatan kualitas DAS dan subsistemnya
	Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang)	Belum Selarasnya RTRWN, RTRWP, RTRWK dan Belum Optimalnya RDTR yang mendukung IKN
		Rencana Tata Ruang Belum menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang
		Belum Optimalnya fungsi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Berpijak pada permasalahan pembangunan di atas dan berdasar pada permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam implementasi renstra periode lalu dan segala potensi keberlanjutannya menjadi dasar penting untuk mengetahui lingkungan strategis organisasi di masa datang. Secara umum potensi dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

dipandang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan jika dilakukan secara sistemik. Analisis permasalahan dan isu strategis yang tepat akan meningkatkan efektivitas perencanaan dalam mencapai sasaran dan memecahkan permasalahan yang dihadapi DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam turut menopang kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas layanan publik dalam lima tahun ke depan.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dapat dianalisis dan dipetakan melalui kerangka logis analisis permasalahan secara berjenjang dari aspek dampak layanan, penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga, dan dukungan kelembagaan (sarana-prasarana, teknologi-informasi, SDM-internal, dan sistem operasional) untuk mendapatkan fungsi-fungsi manajemen yang paling kritis dalam mendongkrak kinerja organisasi secara keseluruhan.

Gambar 2.
Kerangka Logis: Analisis PermasalahanDPUPR-PERA
Provinsi Kalimantan Timur

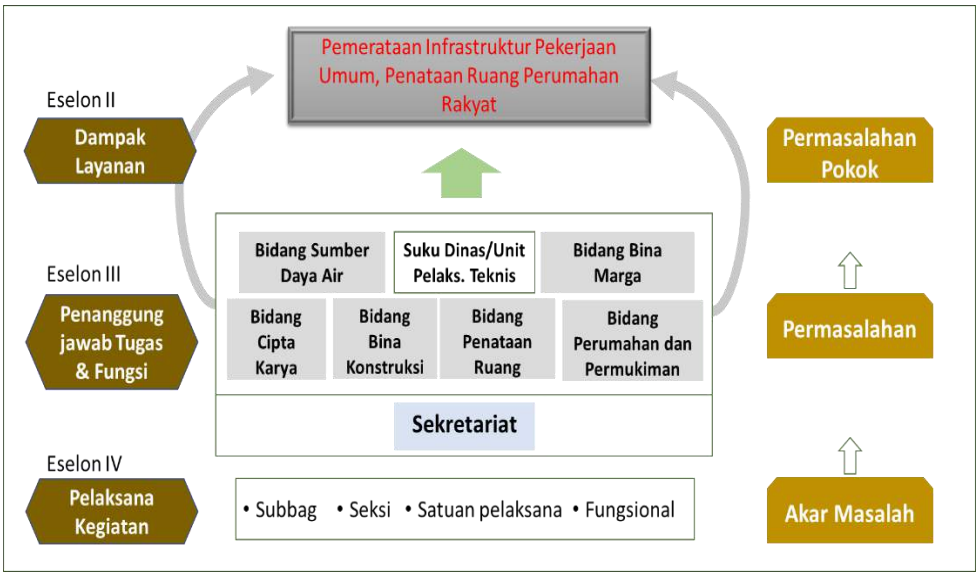

Kerangka logis analisis permasalahan sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas memperlihatkan bahwa untuk memudahkan pengembangan kebijakan strategis dan kebutuhan identifikasi kinerja sesuai struktur organisasi, analisis permasalahan harus diurai secara berjenjang sebagai tanggung jawab pejabat eselon II, III, IV dan seterusnya di lingkungan DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur.

Permasalahan pokok hadir dan menjadi tanggung jawab eselon II sebagai dampak layanan dari permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh sekretariat, bidang-bidang, dan sekretaris (eselon III). Permasalahan harus diurai lagi untuk memahami akar masalah yang selanjutnya akan menjadi tanggung jawab eselon IV.

Berdasarkan analisis capaian kinerja dan isu strategis yang ada di setiap elemen DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diuraikan di bab terdahulu serta mengacu pada rumusan permasalahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tampak pada Tabel 3.1 di atas maka permasalahan utama DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: "**Pelayanan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman serta tata ruang belum optimal dan menjangka seluruh wilayah Kaltim**". Permasalahan utama ini kemudian dirinci kedalam 6 (enam) permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Masih rendahnya konektivitas wilayah Kaltim;
2. Masih tingginya kawasan kumuh;
3. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an;
4. Masih rendahnya utilitas infrastruktur sumber daya air;
5. Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang Kaltim yang mendukung pembangunan berkelanjutan; dan
6. Rendahnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi.

Permasalahan pokok tersebut selaras dengan permasalahan daerah yang dipotret dalam RPJMD dalam konteks pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayahyang ditempatkan sebagai jalan utama untuk mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Permasalahan pokok tersebut muncul karena adanya berbagai indikasi permasalahan yang ada di setiap unit kerja di DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur, merujuk pada kerangka analisis sebagaimana penjelasan berikut.

1. Belum berkualitasnya infrastruktur dasar aksesibilitas wilayah

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur belum memadai hal ini terlihat dari permasalahan pokok "masih rendahnya konektivitas wilayah Kaltim". Kondisi tersebut disebabkan oleh permasalahan belum berkualitasnya infrastruktur dasar pelayanan masyarakatyang ditandai dengan belum terpenuhinya

kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada beberapa sektor seperti transportasi, perumahan dan hinggaketersediaan dan kualitas infrastruktur pemukiman dan air bersih. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya ketersediaan jaringan jalan dalam menghubungkan kawasan-kawasan strategis provinsi serta masih adanya beberapa fasilitas/infrastruktur sosial yang belum didukung akses jalan yang memadai, misalnya Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Mahakam Ulu.

Prasarana Jaringan Jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2021 mencapai 673,12 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 257,03 km, kondisi sedang mencapai 416,10 km, kondisi rusak ringan mencapai 104,3 km, dan kondisi rusak berat mencapai 117,67 km. Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.710,90 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2020 mencapai 1.302,43 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 127,39 Km, kondisi sedang 1.175,04 Km, kondisi rusak ringan mencapai 268,76 Km, dan kondisi rusak berat mencapai 139,71 Km.

Hal tersebut diperparah dengan minimnya sarana dan prasarana perhubungan darat yang masih memiliki fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang minim serta kurangnya pemeliharaan dan perawatan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan perekonomian di semua kota, kabupaten dan kecamatan sehingga menyebabkan fatalitas kecelakan semakin meningkat.

Fungsi jalan sebagai pembuka daerah terisolir dan terpencil agar dapat bersama menikmati pembangunan dan mengembangkan potensi suatu wilayah sangatlah penting, khususnya bagi wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang luas dan masih banyak wilayah yang terisolir, terpencil serta terluar (3T). Selain itu, daya dukung infrastruktur jalan untuk mendukung kawasan pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat Produksi juga menjadi pertimbangan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar ini. Perkembangan jumlah beban angkutan yang semakin meningkat akibat peningkatan pembangunan juga berpengaruh terhadap kinerja jalan dan jembatan dalam melayani pergerakan barang dan manusia di kemudian hari.

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akar masalah dari permasalahan “Belum berkualitasnya infrastruktur dasar pelayanan masyarakat” yaitu:

a. Belum optimalnya perencanaan dalam memenuhi infrastruktur dasar pelayanan masyarakat.

b. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung konektivitas.

c. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan.

2. Penanganan kawasan kumuh belum optimal

Berkembangannya kawasan kumuh di perkotaan seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di kota-kota Provinsi Kalimantan Timur dapat mempengaruhi beban terhadap infrastruktur permukiman. Kawasan ini berkembang karena adanya migrasi dan tingkat ekonomi, sosial dan keahlian sumber daya manusia migran. Permasalahan pokok "Masih tingginya kawasan kumuh" muncul karena dipicu oleh permasalahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yakni penanganankawasan kumuh yang belum optimal. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni serta rendahnya ketersediaan utilitas pemukimanbagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Permasalahan lain adalah rendahnya sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan pengentasan pemukiman kumuh karena belum teridentifikasinya target group intervensi secara baik. Persoalan-persoalan tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan indikator-indikator pemukiman layak huni belum optimal dilakukan seperti kurangnya ketersediaan drainase,sanitasi layak, jalan lingkungan belum memadai,sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan persampahan di kawasan permukiman.

Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan pemukiman belum sesuai harapan. Hal ini ditunjukan dari belum optimalnya perencanaan dan pengawasan terkait peningkatan kawasan kumuh perkotaan di mana masih terdapat 6 titik kawasan pemukiman kumuh di bawah kewenangan pemerintah provinsi yang tersebar di tiga kabupaten/kota serta masih belum optimalnya upaya relokasi kawasan pemukiman di Sempadan Sungai Karangmumus, Sungai Karang Asam Besar, Sungai Karang Asam Kecil, Sungai Guntung, Sungai Bontang, dan Sungai Rapak Dalam. Selain itu, akses masyarakat terhadap rumah layak huni belum optimal. Hal tersebut diindikasikan dengan perbaikan *backlog* kepemilikian dan penghunian rumah yang belum optimal setiap tahunnya. Lingkungan yang layak anak dan bagi masyarakat berkebutuhan khusus menjadi standar dalam pelayanan infrastruktur yang diwujudkan dalam keandalan bangunan dan penataan lingkungan.

Kawasan kumuh di mana pada tahun 2021, yang sudah tertangani seluas 1.190,14 ha. Tingkat akses masyarakat, terutama Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR), terhadap rumah layak huni juga masih cukup rendah di mana hingga tahun 2017 tercatat bahwa rumah layak huni di provinsi Kalimantan Timur mencapai 51.722 unit (berdasarkan verifikasi Pemda). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tinggal dalam kondisi rumah yang tidak layak (kumuh). Komponen-komponen pemukiman layak huni yang belum terpenuhi diantaranya adalah akses terhadap perumahan, sanitasi, jalan lingkungan dan PSU permukiman lainnya.

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akar masalah dari permasalahan "Penanganan kawasan kumuh belum optimal" yaitu:

a. Belum optimalnya perencanaan dalam mewujudkan pemerataan kawasan pemukiman layak huni.
b. Belum meratanya kualitas perumahan rakyat yang layak huni.
c. Belum meratanya kualitas kawasan permukiman penduduk yang sehat.

3. Belum optimalnya distribusi air minum bersih ke masyarakat

Permasalahan pokok "Masih rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an" yang hadir karena dipicu oleh permasalahan "Belum optimalnya distribusi air minum bersih ke masyarakat", yang dapat dilihat dari data capaian akses air minum layak tahun 2021 yang menunjukan capaian sebesar 70,78 persen. Angka ini masih jauh dari target yang ingin dicapai yakni mampu melayani seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Meskipun telah terjadi peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 sebesar 51,7 persen dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 54,3 persen, namun capaiannya belum maksimal terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan disisi lain cakupan layanan air minum di Samarinda telah mencapai 95,46 persen. Di sini, terlihat jelas ketidakmerataan dalam pelayanan air bersih. Lebih lanjut, masih minimnya cakupan air bersih perpipaan disebabkan oleh masih kurangnya infrastruktur Sistem Penyedian Air Minum (SPAM). Cakupan layanan air minum melalui jaringan PDAM Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya optimal. Pembagian dan pemerataan layanan air bersih terutama untuk air minum maupun pengelolaanya perlu lebih ditingkatkan.

Selain masih belum optimalnya layanan air bersih, kualitas tata bangunan dan lingkungan masyarakat Kalimantan Timur juga masih jauh dari rencana tata ruang yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akar masalah dari permasalahan "Belum optimalnya distribusi air minum bersih ke masyarakat" yaitu:

a. Rendahnya kualitas perencanaan dalam memeratakan distribusi air minum bersih.
b. Rendahnya kualitas tata bangunan dan lingkungan masyarakat.
c. Rendahnya kualitas sanitasi kawasan permukiman.

4. Pelayanan jaringan irigasi dan sumber air belum optimal

Salah satu sektor strategis pembangunan di Kalimantan Timur karena keberadaanya tidak hanya krusial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga menyangkut aktivitas perekonomian adalah Sumber Daya Air. Meskipun pada periode RPJMD sebelumnya, pembangunan sektor Sumber Daya Air telah difokuskan pada 3 aspek, yakni upaya pemenuhan Kebutuhan Air baku baik untuk kebutuhan domestik dan industri, Pembangunan jaringan irigasi untuk memberikan suplai air pada lahan pertanian, serta upaya pengendalian daya rusak air secara khusus pada pengendalian banjir; namun dalam capaian kinerjanya menunjukan hasil yang belum optimal sehingga masih memerlukan tindak lanjut pada RPJMD periode 2019-2023, yang dioperasionalkan pada Renstra DPUPR-PERA ini.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan air juga meningkat. Berdasarkan tabel neraca air baku sebagaimana yang telah tersaji dilaporan, masing-masing kabupaten/kota kecuali Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur mengalami defisit kebutuhan air baku sehingga proyeksi kebutuhan air baku lima tahun mendatang mengalami defisit yang semakin tinggi.Defisit air baku lebih disebabkan masih kurangnya pembangunan infrastruktur pengambil air baku pada air permukaan dan semakin berkurangnya cadangan air tanah.Untuk itu, diperlukan infrastruktur pendayagunaan sumber daya air.

Permasalahan berikutnya yang tak kalah penting terkait dengan ketersediaan air baku adalah fungsi pelayanan irigasi untuk memberikan suplai air pada lahan pertanian yang belum optimal di mana pada

tahun 2021, luas lahan pertanian yang terlayani jaringan irigasi mencapai 14.078,50 Ha.

Hal ini terjadi salah satunya karena dalam proses perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan pencetakan sawah, integrasi memang belum dilakukan hingga posisi/lokasi spesifik. Penyebab utama dari hal ini adalah belum tersedianya data geospasial yang akurat mengenai kondisi lahan sawah eksisting serta rencana lokasi pencetakan sawah. Penyediaan data yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan agar kedepannya persoalan ini tidak menjadi penghambat Kaltim untuk meningkatkan indeks pertanaman dan presentase ketersediaan berasyang mana dalam 5 tahun kedepan target rasio pemenuhan beras adalah 106 persen

Adapun akar masalah dari permasalahan "Pelayanan jaringan irigasi dan sumber air belum optimal" yaitu:

a. Rendahnya kualitas perencanaan infrastruktur irigasi dan kapasitas tampung sumber daya air.

b. Rendahnya kualitas infrastruktur irigasi dan kapasitas sumber daya air baku.

c. Minimnya pengendalian banjir serta kualitas pengawasan sungai dan pantai.

5. Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang

Permasalahan pokok "Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang" hadir karena dipicu oleh permasalahan "Belum optimalnya penegakan tata ruang". Praktik yang terjadi di lapangan masih banyak terjadi penyalahgunaan terkait dengan pemanfaatan ruang. Hal ini terlihatdari masih adanya beberapa ketidaksesuaian antara Perda RTRW Provinsi Kalimantan Timur dengan Perda RTRW Kabupaten/Kota, khususnya pada Struktur dan Pola Ruang dimana sebagian besar Perda RTRW Kabupaten/Kota sudah terlebih dahulu ditetapkan menjadi Perda sebelum diterbitkanya Perda RTRW Provinsi namun ada pula RTRW Kabupaten/Kota yang belum ditetapkan.Singkatnya, rencana Rinci Tata Ruang pada skala Provinsi dan Kabupaten/Kota belum ditetapkan

secara keseluruhan sehingga menjadikan belum optimalnya keselarasan antara RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota.

Lebih lanjut, Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Timur belum dapat diterapkan sepenuhnya sebagai faktor pengawasan dan pengendalian karena belum sepenuhnya Rencana Rinci Tata Ruang KSP ada dan berkekuatan hukum sehingga pengendalian dan pengawasan belum dilakukan secara terstruktur, akurat dan cepat. Dalam praktik penyelenggaraanya ditemui pula adanya inkonsistensi perencanaan dan eksisting.Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang ini dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan disebabkan oleh inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Tingginya perubahan alih fungsi lahan, dari kawasan Lindung menjadi Kawasan Budidaya, dan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian juga menjadi faktor berikutnya yang menyebabkan belum optimalnya penegakan tata ruang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperparah dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Rendahnya partisipasi masyarakat ini disebabkan tidak tersampaikannya informasi tentang peraturan penataan ruang dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang. Selain itu, belum adanya Perda/Pergub Operasionalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi Peraturan Zonasi, Pemberian Insentif dan Disinsentif dan Pengenaan Sanksi juga menjadi hambatan tersendiri bagi penegakan tata ruang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akar masalah dari permasalahan “Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang” yaitu:

a. Belum disusun dan ditetapkannya Perda terkait RRTR sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
b. Belum optimalnya kesesuaian Pola Ruang antara RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota

6. Minimnya peningkatan kualitas tenaga kerja jasa konstruksi.

Rendahnya kualitas bangunan di Provinsi Kalimantan Timur masih menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian. Persoalan ini diakibatkan oleh belum optimalnya sistem pengawasan konstruksi bangunan. Sistem pengawasan ini terkait dengan kebutuhan sumber daya manusia tenaga ahli dan terampil yang belum terpenuhi.Minimnya tenaga kerja konstruksi di Kalimantan Timur dapat dilihat dari data tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat, berdasarkan Laporan Sertifikat Keterampilan dan Keahlian LPJKP Kalimantan Timur yang menunjukan bahwa Penerbitan SKA K3 Konstruksi dan Sertifikt Petugas K3 Konstruksi di Kalimantan Timur masih sangat minim sekali bila dibandingkan dengan jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ada di Kalimantan Timur, dimana jumlah Ahli Muda Konstruksi sebesar 90% dan Ahli Madya sebesar 10% dan Ahli Utama masih belum ada di Kalimantan Timur.Adapun Kapasitas Provinsi dalam mencetak pertugas K3 Konstruksi hanya berjumlah 196 orang saja yang dapat dihasilkan dari program dan Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi selama kurun waktu 3 Tahun terakhir.

Permasalahan pokok “Rendahnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi” hadir karena adanya permasalahan “Minimnya peningkatan kualitas tenaga kerja jasa konstruksi” yang disebabkan oleh akar masalah, yakni:

a. Rendahnya kualitas perencanaan penyelenggaraan jasa konstruksi.
b. Minimnya pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi.
c. Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Selain itu, permasalahan pokok “Rendahnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi” hadir karena adanya permasalahan “Rendahnya kapasitas kelembagaan”. Secara umum, kapasitas kelembagaan DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan lagi. Berbagai permasalahan kelembagaan yang penting untuk diperhatikan diantaranya adalah belum optimalnya peran dan fungsi DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga pemerintah bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat. Kemudian, terbatasnya akses informasi yang dapat diperoleh masyarakat terkait dengan pemanfaatan RTRWjuga menjadi kendala tersendiri dalam menciptakan intergrasi yang

baik dengan semua pihak.Minimnya sarana dan prasarana serta SOP dalam melaksanakan kebijakan juga menjadi akar permasalahan berikutnya.

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akar masalah dari permasalahan "Rendahnya kapasitas kelembagaan" yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas kesekretariatan OPD.
b. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.
c. Minimnya kompetensi dan sumber daya manusia masing-masing bidang/sekretariat.
d. Rendahnya pengendalian dan pengawasan administrasi keuangan daerah.

Dari keseluruhan uraian permasalahan di atas, secara singkat permasalahan pokok, permasalahan dan akar masalah DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dapat dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 5.
Pemetaan Permasalahan DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur

Permasalahan Pokok		**Permasalahan**	**Akar masalah**
Pelayaan infrastruktur PU, Perumahan dan pemukiman serta tata ruang belum optimal dan menjangkau seluruh wilayah kaltim			
1	Masih rendahnya konektivitas wilayah kaltim	**Bidang Bina Marga:** Belum berkualitasnya infrastruktur dasar pelayanan masyarakat	Belum optimalnya perencanaan dalam memenuhi infrastruktur dasar pelayanan masyarakat
			Belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung konektivitas
			Rendahnya kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan

Permasalahan Pokok		Permasalahan	Akar masalah
2	Masih tingginya kawasan kumuh	**Bidang Perumahan & Pemukiman:** Penanganan kawasan kumuh belum optimal	Belum optimalnya perencanaan dalam mewujudkan pemerataan kawasan pemukiman layak huni
			Belum meratanya kualitas perumahan rakyat yang layak huni
			Belum meratanya kualitas kawasan permukiman penduduk yang sehat
3	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an	**Bidang Cipta Karya:** Belum optimalnya distribusi air minum bersih ke masyarakat	Rendahnya kualitas perencanaan dalam memeratakan distribusi air minum bersih
			Rendahnya kualitas tata bangunan dan lingkungan masyarakat
			Rendahnya kualitas sanitasi kawasan permukiman
4	Masih rendahnya utilitas infrastruktur sumber daya air	**Bidang SDA**: Pelayanan jaringan irigasi dan sumber air belum optimal	Rendahnya kualitas perencanaan infrastruktur irigasi dan kapasitas tampung sumber daya air
			Rendahnya kualitas infrastruktur irigasi dan kapasitas sumber daya air baku
			Minimnya pengendalian banjir serta kualitas pengawasan sungai dan pantai

Permasalahan Pokok		Permasalahan	Akar masalah
5	belum otimalnya pemanfaatan tata ruang Kaltim yang mendukung pembangunan berkelanjutan	**Bidang Penataan Ruang:** Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang	Belum disusun dan ditetapkannya Perda terkait RRTR sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
			Belum optimalnya kesesuaian Pola Ruang antara RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota
6	Rendahnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	**Bidang Bina Konstruksi:** Minimnya peningkatan kualitas tenaga kerja jasa konstruksi	Rendahnya kualitas perencanaan penyelenggaraan jasa konstruksi
			Minimnya pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi
			Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi
		Sekretariat: Rendahnya kapasitas kelembagaan	Belum optimalnya kualitas kesekretariatan OPD
			Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai
			Minimnya kompetensi dan sumber daya manusia masing-masing bidang/sekretariat
			Rendahnya pengendalian dan pengawasan administrasi keuangan daerah

Isu strategis adalah hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendesak, mendasar, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelanggaraan pemerintah daerah di masa mendatang. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan. Beberapa isu strategi kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya untuk menurunkan ketimpangan antar wilayah dan dapat menjadi masukan dalam penyusunan Renstra DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:

1. Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah

   Infrastruktur pendukung konektifitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan di beberapa KSP masih belum optimal oleh karena itu penguatan Kawasan Strategis Provinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daaerah perlu dilakukan melalui peningkatan akses dan konektifitas antar kawasan untuk mendukung percepatan realisasi investasi industri pengolahan produk unggulan daerah pada masing-masing kawasan. Di samping itu pula pengembangan sosial ekonomi perdesaan, wilayah pedalaman dan tertinggal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konektifitas antar kawasan.

2. Peningkatan Daya Saing Daerah

   Keterbatasan infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi rendahnya daya saing daerah. Oleh karena itu,peningkatan daya saing daerah harus dilakukan melalui serangkaian upaya terpadu antara pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam mendukung kemandirian daerah, tidak hanya berorientasi pada indikator perekonomian saja, melainkan lebih luas yang didalamnya mencakup pula upaya untuk meningkatkan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan melalui percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama di daerah pedalaman dan tertinggal.

3. Pemanfaatan ruang

Daya dukung dan daya tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (*Carrying Capacity*) menjadi pertimbangan dalam kebijakan pembangunan kewilayahan. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur menjadi sangat penting dan strategis untuk peningkatan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Pengendalian pemanfaatan ruang perlu diarahkan pada penataan kembali pola pengelolaan sumber daya alam melalui pengendalian perijinan investasi dengan mempertimbangkan kapasitas regenerasi sumber daya alam dan keragaman lingkungan hidup, penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah.Harmonisasi peraturan perundangan terkait pemanfaatan ruang merupakan faktor kunci yang mampu mendorong upaya penurunan ketimpangan antar wilayah.

Selain isu strategis kewilayahan, isu strategis dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya oleh Provinsi Kalimantan Timur dalam masa pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
2. Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal;
3. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel; dan
6. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Berpijak pada isu strategis RPJMD di atas, jelas bahwa penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta pada memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas di Kalimantan Timur. Ketersediaan perumahan yang layak huni, air baku dan

air minum bersih, serta listrik, dan disertai dengan infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas perhubungan pelayaran, menjadi perhatian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termuat di dalam RTRW Kaltim, dikuatkan oleh infrastruktur yang optimal, menjadi denyut nadi tranformasi ekonomi hijau Kalimantan Timur.

Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terusmeningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan.Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khusunya bidang PU dan permukiman di Indonesia adalah kendala alamiah berupastruktur wilayah geografis; disparitas dan distribusi penduduk di Jawa dan luar Jawa; menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerahseperti jalan provinsi/kabupaten/kota; serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya

Isu strategisDPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan per bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, yaitu:

Bidang Bina Kontruksi

1. Fungsi pembinaan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya menyentuh masyarakat jasa konstruksi, sementara kemampuan pemerintah pusat terbatas.
2. Pengembangan usaha jasa konstruksi melalui investasi belum diatur di dalam regulasi konstruksi sebelumnya.
3. Masih sedikitnya tenaga kerja konstruksi bersertifikat sehingga perlu penataan ulang pengaturan terhadap sistem sertifikasi.
4. Kurangnya pengetahuan tenaga kerja konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur terhadap kualitas pembangunan.

Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Berkembangannya kawasan kumuh di perkotaan seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di kota-kota Provinsi Kalimantan Timur yang dapat mempengaruhi beban terhadap infrastruktur permukiman. Kawasan ini berkembang karena adanya migrasi dan tingkat ekonomi, sosial dan keahlian sumber daya manusia migran.
2. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik
3. Lingkungan yang layak anak dan bagi masyarakat berkebutuhan khusus menjadi standar dalam pelayanan infrastruktur yang diwujudkan dalam keandalan bangunan dan penataan lingkungan
4. Bencana alam menjadi bagian dalam kinerja pelayanan infrastruktur telah menjadi standar dalam pelayanan infrastruktur.

Bidang Sumber Daya Air

1. Perlunya penguatan infrastruktur irigasi pada lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
2. Fungsi pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal yang diakibatkan oleh kerusakan jaringan irigasi, berkurangnya pasokan air dan sebagainya
3. Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk lahan pertanian dan air baku untuk konsumsi air minum masyarakat.
4. Fasilitas sarana dan prasarana pengendali banjir belum berfungsi optimal

Bidang Cipta Karya

1. Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk penyediaan air bersih dan sanitasi yg layak bagi masyarakat.
2. Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan berpengaruh terhadap jumlah limbah KM/WC berupa : air sabun, limbah padat dan limbah cair
3. Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah sampah rumah tangga yang berupa sampah organik dan non organic
4. Kurang optimalnya fungsi drainase di perkotaan

Bidang Bina Marga

1. Rendahnya daya dukung infrastruktur jalan untuk mendukung kawasan pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat Produksi.

2. Fungsi jalan sebagai pembuka daerah terisolir dan terpencil agar dapat bersama menikmati pembangunan dan mengembangkan potensi suatu wilayah. Hal ini sangat penting bagi wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang luas dan masih banyak wilayah yang terisolir, terpencil serta terluar (3T)
3. Perkembangan jumlah beban angkutan yang semakin meningkat akibat peningkatan pembangunan berpengaruh terhadap kinerja jalan dan jembatan dalam melayani pergerakan barang dan manusia di kemudian hari.
4. Kurangnya pemeliharaan dan perawatan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan perekonomian di semua kota, kabupaten dan kecamatan.

Bidang Penataan Ruang

1. Terdapat beberapa ketidaksesuaian antara Perda RTRW Provinsi Kalimantan Timur dengan Perda RTRW Kabupaten/Kota, khususnya pada Struktur dan Pola Ruang. Dimana sebagian besar Perda RTRW Kabupaten/Kota sudah terlebih dahulu ditetapkan menjadi Perda sebelum diterbitkanya Perda RTRW Provinsi.
2. Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Timur belum dapat diterapkan sepenuhnya sebagai faktor pengawasan dan pengendalian karena belum sepenuhnya Rencana Rinci Tata Ruang KSP ada dan berkekuatan hukum sehingga Pengendalian dan pengawasan belum dilakukan secara terstruktur, akurat dan cepat
3. Tingginya perubahan alih fungsi lahan, dari kawasan Lindung menjadi Kawasan Budidaya, dan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Hal ini disebabkan tidak tersampaikannya informasi tentang peraturan penataan ruang dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang
5. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan.

1.7 SARANA DAN PRASARANA KERJA

Tabel 6. Sarana dan prasarana kerja

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Tanah	2	22.285 (m2)
			20.355 (m2)
2	Gedung	6	3 Unit (3 Lantai)
			2 Unit (2 Lantai)
			1 Unit (1 Lantai)
3	Listrik	4	Jaringan
4	Air	5	Jaringan
5	Telepon	35	Line (4 Fax)
6	Area Parkir	4	Area
7	Ruang Rapat	12	Ruangan
8	Ruang Arsip	5	Ruangan
9	Taman Luar	4	Area Taman

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

a. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Yaitu Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023

"Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat"

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Guna mewujudkan visi Gubenur dan Wakil Gubenur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. **Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan**;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mendukung seluruh misi Gubernur Kalimantan Timur terutama misi ke tiga "Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan" dimana pembangunan diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis.

Tujuan keterkaitan visi adalah untuk memperlihatkan visi yang ditetapkan tidak terpisahkan dengan rencana pembangunan di atasnya. Visi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan merupakan visi yang tak terpisahkan dengan visi Kementerian Pekerjaan Umum, Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan Visi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Keterkaitan misi ditujukan untuk menjamin sinergitas, keberlanjutan dan konsistensi terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Menyelenggarakan penataan ruang yang mampu menjadi landasan dalam pengembangan wilayah serta keterpaduan antar sektor melalui pendekatan partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan;
2. Mengembangkan infrastruktur sumberdaya air guna mendukung terhadap ketersediaan sumber air baku bagi ketahanan pangan serta pengendalian terhadap banjir;
3. Mengembangkan Infrastruktur jalan dan jembatan guna mendukung terciptanya kemudahan pergerakan lalu lintas ekonomi antar wilayah dan kawasan serta mendorong keterbukaan kawasan pedalaman, tertinggal dan terisolir;
4. Mengembangkan infrastruktur dasar permukiman dan bangunan guna mendukung terciptanya kawasan permukiman yang layak huni, sehat, produktif, berwawasan lingkungan serta ramah terhadap masyarakat yang berkebutuhan khusus.

b. TUJUAN DAN SASARAN

Berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berdasarkan hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta mengacu pada visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 "**Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan**" maka telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dan kemudian mengalami perubahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.

Periode pembangunan daerah sudah dilaksanakan selama dua tahapan pembangunan tahunan 2019 dan 2020 sesuai perencanaan yang telah ditetapkan, namun dikarenakan adanya perubahan kebijakan Nasional disertai kejadian bencana Nasional Pandemi COVID-19, maka dirumuskan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Perubahan RPJMD tersebut masih tetap memiliki visi dan misi yang sama seperti RPJMD Murni dengan visi dan misi sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini

Gambar 3.
Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Visi “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat” mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam

mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi dimaksud, lima misi telah disepakati sebagai kredo bagi perumusan kebijakan pembangunan. Adapun prioritas pembangunan daerah di bidang infrastruktur diamanatkan dalam misi RPJMD ketiga: **Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan** yang memberikan cara pandang bahwa keberhasilan pembangunan daerah di samping diwujudkan dalam bentuk kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, tak kalah penting adalah sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur secara merata.

Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan wilayah, dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing Provinsi Kalimantan Timur. Penyediaan infrastrukur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Namun demikian, kualitas infrastruktur yang belum memadai menjadi problem daya saing di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur sudah menjadi suatu keharusan untuk merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sehingga selain tercapai pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan hidup juga tetap dapat dijaga demi manfaatnya bagi generasi kini dan mendatang.

Misi ketiga RPJMD ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memerhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Pencapaian misi ketiga

RPJMD ini akan diwujudkan melalui serangkaian upaya pembangunan antara lain penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada jalan provinsi dan jalan produksi lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet; penyediaan transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur; serta pembukaan keterisolasian wilayah dengan dikembangkannya sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, dan pembangunan bandar udara. Di samping itu, diupayakan pula pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, serta penyediaan perumahan sederhana, layak huni dan sehat yang diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tujuan dan sasaran merupakan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perubahan **Renstra DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023**. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program perangkat daerah. Adapun Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dengan memerhatikan permasalahan dan isu- isu strategis di bidang pembangunan infrastruktur.

Dalam perencanaan strategis, perumusan tujuan dan sasaran menjadi komitmen bersama seluruh bidang di DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur agar layanan infrastruktur yang diberikan dapat benar-benar memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. Agar menjadi lebih spesifik maka **tujuan** diterjemahkan ke dalam berbagai **sasaran.**

Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, telah dirumuskan tujuan, sasaran, dan indikator yang terkait dengan tugas fungsi DPUPR-PERA sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.
Rumusan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Perubahan RPJMD Terkait Tupoksi DPUPR-PERA

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN		
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar		Indeks Gini
	Sasaran 14 : Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan (kawasan)
		Luas lahan pertanian yang beririgasi (ha)
		Luas genangan banjir perkotaan (Ha)
		Capaian akses air minum layak (%)
		Luas Kawasan Kumuh (Ha)
		Skoring penyelenggaraan

Sumber: Perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023

Berdasarkan tujuan Perubahan RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi DPUPR-PERA di atas, yaitu **"Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar"** maka ditetapkan tujuan Renstra DPUPR-PERA adalah : **Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan**

Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan menjadi komitmen utama DPUPR-PERA agar kesenjangan taraf kehidupan masyarakat dapat diminimalisir sebagaim5ana ditunjukkan oleh indeks gini pada indikator tujuan Perubahan RPJMD. Hal ini berimplikasi pada pentingnya memprioritaskan investasi bidang infrastruktur pada wilayah-wilayah di Kalimantan Timur dengan kondisi layanan infrastruktur yang masih rendah. Untuk itu, aspek aksesibilitas menjadi salah satu kata kunci penting bagi terbukanya pintu pemerataan layanan infrastruktur lainnya, khususnya bagi pembukaan keterisolasian daerah. Di tingkat

makro, dukungan infrastruktur diwujudkan melalui terpenuhinya berbagai kebutuhan infrastruktur pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP) agar pusat-pusat pertumbuhan dapat segera beroperasi sehingga memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat di berbagai sektor.

Atas dasar tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Perubahan Renstra DPUPR-PERA dengan indikator kinerja perangkat daerah sebagaimana table . ……. berikut :

TUJUAN (T)	SASARAN (S)	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET		
			2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan 1. Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan		**Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan (kawasan)**	**2**	**2**	**4**	**5**	**7**
		Luas lahan pertanian yang beririgasi (ha)	**13.728,5**	**13.878,50**	**14.028,50**	**14.278,50**	**14.778,50**
		Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	**641**	**477**	**420**	**374**	**329**
		Capaian akses air minum layak (%)	**56,84**	**64,53**	**66,53**	**68,53**	**70,53**
		Luas Kawasan Kumuh (Ha)	**1.525,47**	**1.287,82**	**1.237,82**	**1.187,82**	**1.137,82**
		Skoring penyelenggaraan penataan ruang (%)	**66,46**	**66,46**	**75,94**	**76,74**	**83,10**
S1. Meningkatnya konektivitas antar kawasan		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)	61,45	69,77	75,02	76,15	78,27
S2. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air		Persentase Capaian Layanan Sumber Daya Air (%)	67,23	70,77	74,07	76	78,91
		Panjang saluran drainase yang berfungsi baik (meter)	437,5	1690,6	2785	3020	3455
S3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur keciptakaryaan		Capaian akses air minum layak perpipaan (%)	66,53	67,51	64,64	66,64	68,64
		Capaian Akses Penanganan Sampah Domestik	na	na	68,38	69,74	71,37
		Capaian Akses Air Limbah Domestik Layak	na	na	82,26	84,53	87,27
		Persentase jumlah gedung dan bangunan lingkungan yang tertata (%)	20,97	41,94	81,45	95,16	100
S4. Menurunnya luas kawasan kumuh dan jumlah rumah tidak layak huni		Luas Kawasan Kumuh (Ha)	1.525,47	1.287,82	1.237,82	1.187,82	1.137,82
S5. Tercapainya SPM Bidang Perumahan		Skoring Penyelenggaraan SPM bidang Perumahan (%)	na	na	46,16	50	55
S6. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang		Skoring penyelenggaraan penataan ruang (%)	66,46	66,46	75,94	76,74	83,10
S7. Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi		Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat (%)	25,88	28,55	31,29	33,27	36,06

c. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Strategi dan kebijakan merupakan sebuah upaya sinergis berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran DPUPR-PERA dalam rangka mewujudkan sasaran P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi pada dasarnya adalah (menunjukkan) prioritas layanan perangkat daerah. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memerhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas (analisis) permasalahan dan isu strategis tugas dan fungsi DPUPR-PERA dalam mendukung pemerataan layanan infrastruktur dasar berbasis tata ruang. Di samping itu, strategi dan arah kebijakan juga diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD.

Secara operasional, strategi menjadi tanggung jawab Eselon III dalam memperbaiki pelayanan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Peningkatan kualitas pelayanan dimaksud dilakukan melalui arah kebijakan dengan fokus pada akar masalah yang menghambat peningkatan layanan selama ini. Adapun arah kebijakan merupakan tanggung jawab Eselon IV. Strategi dan arah kebijakan selanjutnya dioperasionalkan dan dijadikan dasar untuk memberi arah bagi program dan kegiatan perangkat daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang bersama seksi-seksi di dalamnya.

Sesuai dengan prioritas pembangunan pada P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 terkait tata ruang yaitu **penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar**, maka strategi dan arah kebijakan DPUPR-PERA tahun 2019-2023 berfokus pada perwujudan pemenuhan pembangunan infrastruktur dasar dan kewilayahan yang bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Dalam hal ini, penyediaan infrastrukur dasar yang berkualitas ditujukan untuk mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memerhatikan atau bersesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis di Kalimantan Timur.

Tabel 8. Strategi dan Kebijakan SKPD
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan P-Renstra DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN		
Tujuan: Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yangmenunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan		
Sasaran 1: Meningkatnya konektivitas antarkawasan	Bidang Bina Marga: Peningkatan kualitas infrastruktur Kebinamargaan	Peningkatan kualitas perencanaan dalam memenuhi infrastruktur dasar pelayanan masyarakat
		Percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung konektivitas
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jembatan dan bangunan pelengkap
Sasaran 2: Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Bidang SDA: Peningkatan kualitas layanan air baku dan pengendalian daya rusak air	Peningkatan sarana dan Prasarana Air Baku
		Peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur irigasi dan kapasitas tampung sumber daya air
		Peningkatan Kualitas Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai
Sasaran 3: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur keciptakaryaan	Bidang Cipta Karya: Peningkatan kualitas layanan dan distribusi air minum kepada masyarakat	Optimalisasi pelayanan SPAM Lintas Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur
		Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan
		Peningkatan kualitas tata bangunan dan lingkungan
		Peningkatan kualitas air minum dan sanitasi kawasan permukiman
Sasaran 4: Menurunnya kawasan kumuh dan tidak layak huni	Bidang Perumahan & Pemukiman: Peningkatan kualitas penanganan Permukiman	Peningkatan kualitas Perencanaan dan pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan kumuh
		Peningkatan kualitas Pembangunan Rumah Layak huni
		Peningkatan kualitas Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di Permukiman
Sasaran 5: Tercapainya SPM Bidang Perumahan	Bidang Perumahan & Pemukiman: Penyelenggaraan SPM Perumahan	Pendataan dan Identifikasi dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan
Sasaran 6: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Bidang Penataan Ruang: Peningkatan Kinerja perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang	Peningkatan kualitas perencanaan dalam penataan ruang daerah
		Optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
		Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang
Sasaran 7: Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	Bidang Bina Konstruksi: Peningkatan kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi	Peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi
		Optimalisasi pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi
		Optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi

d. PROGRAM

Tabel 9. Keterkaitan Antara Sasaran Strategi Dan Program

No.	Sasaran Strategis	Program
1.	Meningkatnya konektivitas antar kawasan	✓ Program Penyelenggaraan Jalan
2.	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	✓ Program pengelolaan sumber daya air ✓ Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an	✓ Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum ✓ Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional ✓ Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah ✓ Program penataan bangunan gedung ✓ Program penataan bangunan dan lingkungannya
4.	Menurunnya Luas kawasan kumuh dan jumlah rumah tidak layak huni	✓ Program Kawasan Permukiman. ✓ Program Peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU)
5.	Tercapainya SPM bidang perumahan	✓ Program pengembangan perumahan
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	✓ Program penyelenggaraan penataan ruang
7.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	✓ Program penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi

Tabel 10. Keterkaitan Tujuan-Sasaran dan Strategi Arah Kebijakan serta Program

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target			Cara Untuk Mencapai Sasaran		Program
						2019	2020	2021	2022	2023	Strategi	Kebijakan	
Misi 3 : BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung	Meningkat-nya konektivitas antar kawasan	Tingkat kemantapan jalan provinsi	%	61,45	69,77	75,02	76,15	78,27	Peningkatan kualitas infrastruktur Kebinamargaan	1. Peningkatan kualitas perencanaan dalam memenuhi infrastruktur dasar pelayanan masyarakat 2. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung konektivitas 3.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jembatan dan bangunan pelengkap	Program penyelenggaraan jalan

		Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Menurunnya luas kawasan kumuh dan jumlah rumah tidak layak huni	Luas Kawasan Kumuh	Ha	1.525,47	1.287,82	1.237,82	1.187,82	1.137,82	Peningkatan kualitas penanganan Permukiman	1. Peningkatan kualitas Perencanaan dan pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan kumuh 2.Peningkatan kualitas Pembangunan Rumah Layak huni 3.Peningkatan kualitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh	* Program kawasan permukiman * Program Peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU)
			Tercapainya SPM bidang perumahan	Skoring penyelenggaraan SPM bidang perumahan	%	-	-	46,16	50	55	Peningkatan kualitas penanganan bidang perumahan	1. Peningkatan kualitas Perencanaan dan pengawasan pengembangan perumahan 2. Peningkatan kualitas Pengembangan perumahan 3.Peningkatan kualitas Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam pengembangan perumahan	* Program pengembangan perumahan

		Capaian akses air minum layak (%)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an	Capaian akses Air Minum Layak perpipaan	%	56,84	64,53	66,53	68,53	70,53	Peningkatan kualitas layanan dan distribusi air minum kepada masyarakat	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya an 2. Peningkatan kualitas air minum dan sanitasi kawasan permukiman 3. Peningkatan kualitas tata bangunan dan lingkungan	* Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum *Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional *Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah *Program penataan bangunan gedung *Program penataan bangunan dan lingkungannya
				Capaian akses penanganan sampah domestik	%	-	-	68,38	69,74	71,37			
				Capaian akses air limbah domestik layak	%	-	-	82,26	84,53	87,27			
				Persentase jumlah gedung dan bangunan lingkungan yang tertata	%	20,97	41,94	81,45	95,16	100			
		Luas lahan pertanian yang beririgasi (ha)	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Persentase Capaian Layanan Sumber Daya Air	%	67,23	70,77	74,07	76	78,91	Peningkatan kualitas layanan air baku dan pengendalian daya rusak air	1. Peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur irigasi dan kapasitas tampung	* Program pengelolaan sumber daya air.

		Luas genangan banjir perkotaan		Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	m	437,5	1690,6	2785	3020	3455		sumber daya air 2.Peningkatan infrastruktur irigasi dan rawa 3.Peningkatan Prasarana Air Baku, Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai	*Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
		Skoring penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	%	66,46	66,46	75,94	76,74	83,10	Peningkatan Kinerja perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang	1. Peningkatan kualitas perencanaan dalam penataan ruang daerah 2.Optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian Pembangunan 3.Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang
			Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	25,88	28,55	31,29	33,27	36,06	Peningkatan kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi	1. Peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi 2.Optimalisasi pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi 3.Optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi	Program penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi

Tabel 11. Keterkaitan Tujuan-Sasaran serta Program dan Kegiatan

No.	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Program	Kegiatan
1.	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung	Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Tingkat kemantapan jalan provinsi	%	* Program penyelenggaraan jalan	*Penyelenggaraan Jalan Provinsi.
	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Menurunnya luas kawasan kumuh dan jumlah rumah tidak layak huni	Luas Kawasan Kumuh	Ha	* Program kawasan permukiman * Program Peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU)	*Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha. * Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha. *Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.
		Tercapainya SPM bidang perumahan	Skoring penyelenggaraan SPM bidang perumahan	%	* Program pengembangan perumahan	*Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	Capaian akses air minum layak (%)	Meningkat nya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an	Capaian akses Air Minum Layak perpipaan	%	* Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum *Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional *Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota *Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional *Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi *Penetapan dan Penyelenggaraan
			Capaian akses penanganan sampah domestik	%		
			Capaian akses air limbah domestik layak	%		

			Persentase jumlah gedung dan bangunan lingkungan yang tertata	%	*Program penataan bangunan gedung *Program penataan bangunan dan lingkungannya	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi *Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (ha)	Meningkat nya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Persentase capaian layanan sumber daya air	%	* Program pengelolaan sumber daya air.	*Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota. *Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota. *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi.
	Luas genangan banjir perkotaan		Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	Meter	*Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.	
	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	%	*Program penyelenggaraan penataan ruang	*Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi. *Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang. *Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	*Program penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi	*Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi. *Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tabel 12. Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2023)

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Tingkat kemantapan jalan provinsi	%	78,27
	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	- Persentase Capaian layanan Sumber daya Air - Panjang Saluran Drainase Yang Berfungsi Baik	% Meter	78,91 3.455
	Meningkat nya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an	- Capaian akses air minum layak - Capaian akses penanganan sampah domestik - Capaian akses air limbah domestik layak - Persentase jumlah gedung dan bangunan lingkungan yang tertata.	% % % %	68,64 71,37 87,27 100,00
2.	Menurunnya Luas kawasan kumuh dan jumlah rumah tidak layak huni	Luas kawasan kumuh	Ha	1.137,82
3.	Tercapainya SPM bidang perumahan	Skoring penyelenggaraan SPM bidang perumahan	%	55
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	%	83,10
7.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	36,06

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 13. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Tingkat kemantapan jalan provinsi	%	- Perhitungan berdasarkan table rekapitulasi hasil capaian realisasi pertahun * Penjelasan : Total panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan provinsi dikali 100%	1. Renstra 2. Renja 3. DPA 4. Laporan realisasi fisik dan keuangan 5. Pelaporan Hasil Survey/ Identifikasi/Perencanaan 6. Data BPS 7. SK Jalan Provinsi 8. Rekapitulasi Data dari Penyelenggara Air Minum di Kabupaten/Kota (PDAM/Non PDAM, Pemda/Swasta), serta data kependudukan dari DKP3A Prov. Kaltim 9. Rekapitulasi Data dari Penyelenggara Pengelolaan Sampah di	1.Kepala Dinas 2.Bidang Bina Marga 3.Bidang perumahan dan permukiman 4.Bidang Cipta karya 5.Bidang SDA 6.Bidang penataan ruang 7.Bidang bina konstruksi
2.	Meningkat nya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	- Persentase capaian layanan sumber daya air. - Panjang saluran drainase yang berfungsi baik.	% Meter	* Perhitungan Persentase Pengelolaan SDA 70% + Persentase Pembangunan Irigasi 20% + Persentase Pengaman Pantai 10% *Penjelasan : Perhitungannya yaitu Panjang Saluran Drainase berfungsi baik eksisting + capaian Panjang Saluran Drainase berfungsi baik		
3.	Meningkat nya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an	- Capaian akses Air Minum layak perpipaan - Capaian akses penanganan sampah domestic - Capaian akses air limbah domestik layak - Persentase jumlah gedung dan bangunan lingkungan yang tertata	% % % %	- Perhitungan capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan = (Jumlah penduduk yang terlayani air minum layak perpipaan / Jumlah total penduduk administratif) x 100% - Perhitungan Capaian Akses penanganan sampah = (Jumlah tonase timbulan sampah penduduk yang ditangani / total timbulan sampah seluruh penduduk) x 100% - Perhitungan Capaian Akses Air Limbah Domestik Layak = (Jumlah penduduk yang terlayani pengolahan air limbah domestik layak / Jumlah total penduduk administratif) x 100% - Perhitungan (Total Jumlah Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Lingkungan yang dibangun tahun berjalan, dibagi dengan Total Jumlah Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Lingkungan selama periode 5 tahunan RPJMD) x 100%		

4.	Menurunnya luas kawasan kumuh dan jumlah rumah tidak layak huni	Luas kawasan kumuh	Ha	- Perhitungan berdasarkan hasil Jumlah luas kawasan permukiman kumuh se-Kalimantan Timur dan dikurangi dengan jumlah penanganan.	Kabupaten/ Kota (TPA/TPST/TPS 3R), data timbulan sampah rata-rata per kapita dari DLHK, serta data kependudukan dari DKP3A Prov. Kaltim 10. Rekapitulasi Data dari Penyelenggara SPALD di Kabupaten/Kota , dengan data kependudukan dari DKP3A Prov. Kaltim 11. SK ter-update Kawasan Permukiman Kumuh oleh Walikota/Bupati di Provinsi Kalimantan Timur 12. Penilaian Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi dari Kementerian ATR/BPN	
5.	Tercapainya SPM bidang perumahan	Skoring penyelenggaraan SPM bidang perumahan	%	Perhitungan : Setiap sub kegiatan pada program pengembangan perumahan diberi bobot persentase yang keseluruhannya ditotalkan menjadi 100%.		
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	%	-Perhitungan berdasarkan tabel rekapitulasi hasil Penilaian terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang yang diberikan masing-masing bobot.		
7.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	- Perhitungannya adalah Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat _____ x 100% Jumlah Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Kaltim		

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Tabel 14. Perjanjian Kinerja Eselon 2

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Tingkat kemantapan jalan provinsi	%	78,27
2.	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	- Persentase Capaian layanan Sumber daya Air Panjang Saluran Drainase Yang Berfungsi Baik	% Meter	78,91 3.455
3.	Meningkat nya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an	- Capaian akses air minum layak - Capaian akses penanganan sampah domestik - Capaian akses air limbah domestik layak - Persentase jumlah gedung dan bangunan lingkungan yang tertata.	% % % %	68,64 71,37 87,27 100,00
4.	Menurunnya Luas kawasan kumuh dan jumlah rumah tidak layak huni	- Luas kawasan kumuh	Ha	1.137,82
5.	Tercapainya SPM bidang perumahan	- Skoring penyelenggaraan SPM bidang perumahan	%	55
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	%	83,10
7.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	36,06

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. **3.076.384.083.142,00** melalui mekanisme perubahan APBD 2023 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. **+1.015.779.336.265,00** sehingga total anggaran pada APBD 2023 menjadi Rp. **4.092.163.419.407,00**. Adapun realisasi anggaran di tahun 2023 sebesar Rp. **3.551.592.350.191,00** (86,79%)

Tabel 15. Target dan Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**132.405.033.697,00**	**123.641.373.112,00**	**93,38**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.869.857.000,00	1.329.151.330,00	71,08
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.084.718.449,00	53.040.404.966,00	94,57
	UPTD wilayah I	342.240.000,00	251.160.000,00	73,39
	UPTD wilayah II	343.200.000,00	253.800.000,00	73,95
	UPTD wilayah III	366.020.000,00	334.940.000,00	91,51
	UPTD Lab Konstruksi	120.840.000,00	115.660.000,00	95,71
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.549.505.500,00	1.516.931.460,00	97,90
	UPTD wilayah I	420.858.500,00	414.321.439,00	98,45
	UPTD wilayah II	295.335.000,00	295.164.068,00	99,94
	UPTD wilayah III	336.055.000,00	333.239.284,00	99,16
	UPTD Lab Konstruksi	227.856.200,00	221.542.000,00	97,23
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.569.899.450,00	7.864.272.827,00	91,77
	UPTD wilayah I	900.980.100,00	875.078.920,00	97,13
	UPTD wilayah II	940.497.796,00	936.257.179,00	99,55
	UPTD wilayah III	1.093.416.760,00	1.091.707.314,00	99,84
	UPTD Lab Konstruksi	2.296.914.422,00	2.262.640.078,00	98,51
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.794.225.200,00	7.016.444.450,00	90,02
	UPTD wilayah I	2.224.837.420,00	2.198.937.181,00	98,84
	UPTD wilayah II	184.585.600,00	184.020.000,00	99,69
	UPTD wilayah III	40.176.000,00	40.137.600,00	99,90
	UPTD Lab Konstruksi	771.238.300,00	736.100.000,00	95,44
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.296.348.840,00	21.312.154.365,00	95,59

	UPTD wilayah I	2.229.879.920,00	2.179.033.449,00	97,72
	UPTD wilayah II	3.492.615.760,00	3.379.424.797,00	96,76
	UPTD wilayah III	3.790.894.280,00	3.650.352.457,00	96,29
	UPTD Lab Konstruksi	2.232.136.720,00	2.083.439.402,00	93,34
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.235.021.000,00	4.902.648.311,00	93,65
	UPTD wilayah I	1.708.995.600,00	1.698.726.271,00	99,40
	UPTD wilayah II	2.062.276.540,00	2.012.224.271,00	97,57
	UPTD wilayah III	2.082.204.640,00	1.959.969.534,00	94,13
	UPTD Lab Konstruksi	501.403.700,00	480.641.489,00	95,86
2.	**Penyelenggaraan Jalan**	**2.366.773.671.958,00**	**2.146.286.738.394,00**	**90,68**
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	2.195.394.894.982,00	1.976.580.133.758,00	90,03
	UPTD wilayah I	31.834.212.762,00	31.667.380.418,00	99,48
	UPTD wilayah II	44.644.428.876,00	44.624.075.407,00	99,95
	UPTD wilayah III	94.900.135.338,00	93.415.148.811,00	98,44
3.	**Program peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU)**	**235.618.921.548,00**	**126.955.100.225,00**	**53,88**
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	235.618.921.548,00	126.955.100.225,00	53,88
4.	**Program kawasan permukiman**	**78.973.864.461,00**	**74.529.985.007,00**	**94,37**
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	78.973.864.461,00	74.529.985.007,00	94,37
5.	**Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum**	**41.495.427.368,00**	**35.000.747.771,00**	**84,35**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	41.495.427.368,00	35.000.747.771,00	84,35
6.	**Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional**	**1.539.208.500,00**	**1.387.324.288,00**	**90,13**
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.539.208.500,00	1.387.324.288,00	90,13
7.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**2.378.060.500,00**	**2.052.131.497,00**	**86,29**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	2.378.060.500,00	2.052.131.497,00	86,29
8.	**Program pengembangan perumahan**	**2.349.043.830,00**	**1.973.038.353,00**	**83,99**
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	2.349.043.830,00	1.973.038.353,00	83,99

	atau Relokasi Program Provinsi			
9.	**Program penataan bangunan gedung**	**859.637.386.072,00**	**729.624.780.936,00**	**84,88**
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	855.835.139.477,00	725.972.762.153,00	84,83
	UPTD wilayah I	3.802.246.595,00	3.652.018.783,00	96,05
10.	**Program penataan bangunan dan lingkungannya**	**90.485.964.441,00**	**62.148.705.067,00**	**68,68**
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	90.485.964.441,00	62.148.705.067,00	68,68
11.	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**206.753.006.006,00**	**186.019.577.128,00**	**89,97**
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	144.796.083.019,00	131.351.015.205,00	90,71
	UPTD wilayah I	3.001.001.900,00	2.996.359.000,00	99,85
	UPTD wilayah II	549.378.500,00	548.591.800,00	99,86
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35.248.280.587,00	28.196.211.204,00	79,99
	UPTD wilayah I	7.864.200.000,00	7.856.578.000,00	99,90
	UPTD wilayah II	8.881.882.000,00	8.860.365.500,00	99,76
	UPTD wilayah III	6.412.180.000,00	6.210.456.419,00	96,85
12.	**Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase**	**35.289.332.326,00**	**27.289.303.852,00**	**77,33**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	29.086.048.826,00	21.103.521.952,00	72,56
	UPTD wilayah II	6.203.283.500,00	6.185.781.900,00	99,72
13.	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**24.093.527.900,00**	**21.807.005.978,00**	**90,51**
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	18.105.474.300,00	16.376.731.395,00	90,45
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.158.460.000,00	1.125.770.122,00	97,18
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	2.029.948.600,00	1.750.966.620,00	86,26

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	2.799.645.000,00	2.553.537.841,00	91,21
14.	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**13.160.764.800,00**	**11.726.048.641,00**	**89,10**
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	7.671.610.800,00	6.733.245.690,00	**87,77**
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	781.882.000,00	614.955.346,00	**78,65**
	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	4.707.272.000,00	4.377.847.605,00	**93,00**
15.	**Program penelitian dan pengembangan daerah**	**1.210.206.000,00**	**1.150.489.942,00**	**95,07**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.210.206.000,00	1.150.489.942,00	95,07

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Anggaran belanja langsung tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Alokasi Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1.	Meningkatnya konektivitas antar kawasan	2.366.773.671.958,00	90,68	1 Program
2.	Meningkat nya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	242.042.338.332,00	88,13	2 Program
3.	Meningkat nya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an	995.536.046.881,00	83,39	5 Program
4.	Menurunnya luas kawasan kumuh dan jumlah rumah tidak layak huni	314.592.786.009,00	64,05	2 Program
5.	Tercapainya SPM bidang perumahan	2.349.043.830,00	83,99	1 Program
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	24.093.527.900,00	90,51	1 Program
7.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	13.160.764.800,00	89,10	1 Program

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP

Tabel 17. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022

NO	KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI 2021	NILAI 2022
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30 %	20,70	19,80
2	Pengukuran Kinerja	25 %	11,25	12,60
3	Pelaporan Kinerja	15 %	10,42	6,40
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10 %	4,50	11,00
5	Capaian Akuntabilitas Kinerja	20 %	13,19	15,20
	Nilai Hasil Evaluasi	100 %	60,05	65,00
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Tabel 18. Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
1	2	3	4
1	**Perencanaan Kinerja** 1. Menerapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dalam kurun waktu 5 tahun 2. Dokumen perencanaan kinerja yang disusun agar menggambarkan hubungan yang berkesinambungan dengan kondisi yang ingin dicapai pada setiap level jabatan dan memberikan informasi tentang hubungan kinerja,strategi,kebijakan,dan efektivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lainnya yang	1. Telah ditindak lanjuti,dengan saling koordinasi secara internal dalam menerapkan IKU yang disusun untuk kurun waktu 5 tahun 2. Sudah melakukan tindak lanjut dengan membuat renaksi,cascading dan crosscutting	1. Berkoordinasi dengan pihak terkait,dalam pembuatan IKU yang disusun bisa disesuaikan di renstra tahun berikutnya agar jadi lebih baik. 2. Terus melakukan pembenahan dalam perencanaan kinerja dengan membuat renstra yg lebih baik lagi ditahun berikutnya.

	berkaitan (cascading dan crosscutting). 3. Melakukan pemantauan rencana aksi kinerja secara berkala. 4. Melakukan perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik dan dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu.	3. Telah ditindak lanjuti dengan mereview rencana aksi agar bisa terlaksana dengan baik. 4. Sudah ditindak lanjuti,dengan melakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja guna mewujudkan hasil yang lebih baik,dalam mendukung pencapaian RPJMD.	3. Terus melakukan pemantauan, dari renaksi kinerja secara periode agar bisa mengetahui pencapaian dari tujuan/sasaran/hasil program/kegiatan bisa sesuai dengan target progress fisik. 4. Terus melakukan riview/perbaikan dokumen perencanan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya agar bisa mewujudkan hasil lebih baik serta dituangkan dalam bentuk hasil laporan.
2	**Pengukuran Kinerja** 1. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang oleh setiap level organisasi masih dilakukan secara bulanan. 2. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment* serta penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional,penyesuaian recofusing,strategi,kebijakan, aktivitas,dan anggaran dalam mencapai target kinerja.	1. Sudah ditindak lanjuti dengan melakukan pemantauan secara berjenjang agar bisa lebih baik. 2. Telah dilakukan tindak lanjut dalam pengukuran kinerja dengan pengidentifikasian masing-masing.	1.Terus melakukan monitoring dalam mengukur capaian kinerja unit dibawah disetiap level organisasi secara continue. 2. Akan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment* ,serta melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh pegawai akan pentingnya akuntabilitas kinerja agar bisa menjadi acuan buat mencapai target kinerja.

3	**Pelaporan Kinerja** 1. Menyusun laporan kinerja seperti monitoring dan evaluasi atas perjanjian kinerja yang memuat analisa keberhasilan/kegagalan, hambatan,serta rekomendasi tiap triwulan. 2. Menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan realisasi kinerja level provinsi (target akhir RPJMD) pada LKjIP. 3. Memanfaatkan informasi kinerja dalam penyesuaian aktivitas,anggaran,dan perencanaan kinerja serta untuk mempengaruhi budaya kerja organisasi.	1. Sudah melakukan tindak lanjut dalam penyusunan laporan kinerja,dengan menyajikan informasi keseluruhan pelaporan. 2. Telah ditindak lanjuti dalam pelaporan kinerja sudah memberikan informasi kinerja perbandingan dengan tahun sebelumnya. 3. Sudah ditindak lanjuti, dengan memanfaatkan informasi kinerja dengan benar sebagai pengaruh dalam peningkatan kinerja.	1.Terus menyajikan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja dengan memberikan informasi yang terperinci dari data yang disusun secara triwulan. 2.Akan selalu menyajikan dan menyampaikan informasi perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan realisasi kinerja level provinsi (target akhir RPJMD) pada LKjIP dengan benar dalam penyampaian pelaporan kinerja. 3.Terus meningkatkan pemanfaatan Informasi kinerja dengan baik, dalam penyesuaian aktivitas,anggaran,dan perencanaan kinerja guna untuk mempengaruhi peningkatan budaya kerja organisasi.
4	**Evaluasi Akuntbilitas Kinerja Internal** 1. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memuat analisis dan simpulan terhadap kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana pada seluruh bidang/sub bidang/staf setiap bulan. 2. Melakukan perbaikan dengan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan data yang lebih memadai (andal).	1. Telah ditindak lanjuti melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memuat keseluruhan. 2. Sudah dilakukan tindak lanjut dengan mengevaluasi.	1. Akan melakukan pengevaluasian terhadap akuntabilitas kinerja internal yang memuat analisis dan simpulan terhadap kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana pada seluruh bidang/sub bidang/staf dalam setiap bulan 2. Terus melakukan perbaikan dengan cara pengevaluasian dari peningkatan kinerja, memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

			dari data yang akuntabel.
5	**Capaian Akuntabilitas Kinerja** 1. Mengupayakan peningkatan kinerja tahun berjalan agar dapat melebihi dari capaian tahun sebelumnya. 2. Menyajikan data kinerja yang dapat diandalkan,yaitu lengkap,jelas,dan akurat serta dapat ditelusuri hasil perhitungannya.	1. Sudah dilakukan penindak lanjutan dalam upaya peningkatan kinerja agar menjadi lebih baik. 2. Telah ditindak lanjuti dalam penyajian data kinerja yang andal	1. Akan terus mengupayakan peningkatan kinerja menjadi lebih baik lagi pencapaiannya dari tahun ke tahun. 2. Terus melakukan penyajian data kinerja yang profesional,akurat,transparansi,dan dapat dipercaya segala hasil perhitungannya.

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Tabel 19. Pengukuran capaian perjanjian kinerja tahun 2023 per triwulan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Tingkat kemantapan jalan provinsi	%	78,27	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	78,27	79,19	101,17
2	Menurunnya kawasan kumuh dan tidak layak huni	Luas Kawasan Kumuh	Ha	1.137,82	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	1.137,82	1.097,2	176
3	Tercapainya SPM bidang perumahan	Skoring penyelenggaraan SPM bidang perumahan	%	55	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	55	73	133

4	Meningkat nya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an	Capaian akses air Minum layak Perpipaan	%	68,64	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	68,64	73,92	107,69
		Capaian akses Penanganan Sampah Domestik	%	71,37	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	71,37	73,51	103
		Capaian Akses Air Limbah Domestik Layak	%	87,27	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	87,27	83,84	96,07
		Persentase Jumlah Gedung dan Bangunan Lingkungan Yang Tertata	%	100	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	100	100	100

5	Meningkat nya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Persentase Capaian Layanan Sumber Daya Air	%	78,91	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	78,91	92,33	117
		Panjang Saluran Drainase yang berfungsi Baik	Meter	3.455	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	3.455	3.977,7	115,13
6	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	%	83,10	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	83,10	83,10	100
7	Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	36,06	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	36,06	41,70	115,64

Tabel 20. Pengukuran capaian perjanjian kinerja per tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Tingkat kemantapan jalan provinsi	%	78,27	79,19	101,17
2	Menurunnya luas kawasan kumuh dan jumlah rumah tidak layak huni	Luas Kawasan Kumuh	Ha	1.137,82	1.097,2	176
3	Tercapainya SPM bidang perumahan	Skoring penyelenggaraan SPM bidang perumahan	%	55	73	133
4	Meningkat nya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an	Capaian akses air Minum layak perpipaan	%	68,64	73,92	107,69
		Capaian akses penanganan sampah domestik	%	71,37	73,51	103
		Capaian akses air limbah domestic layak	%	87,27	83,84	96,07
		Persentase jumlah gedung dan bangunan lingkungan yang tertata	%	100	100	100
5	Meningkat nya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Persentase capaian layanan sumber daya air	%	78,91	92,33	117
		Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	Meter	3.455	3.977,7	115,13
6	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	%	83,10	83,10	100
7	Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	36,06	41,70	115,64

3. 3. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA SERTA PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Sasaran 1 : Meningkatnya Konektivitas antar kawasan.

Dalam sasaran strategis ini yaitu meningkatnya konektivitas antar kawasan,guna mengakomodir kawasan yang terisolir agar dapat terhubung sehingga bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.

Tabel 21. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Tingkat kemantapan jalan provinsi	Persentase	78,27	79,19	101,17 %

Realisasi Kinerja dari Tahun 2022 s/d 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023
1	2	3	4	5	6= (5-4)/4*100
1	Tingkat kemantapan jalan provinsi	Persentase	77,52	79,19	2,15

Realisasi Kinerja 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Tingkat kemantapan jalan provinsi	Persentase	79,19	78,27	101,17

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Sampai dengan Tw 4 pelaksanaan rekonstruksi jalan telah mencapai 114 Km. Ini terdiri dari ruas jalan yang kondisinya sedang ditingkatkan menjadi baik, dan ruas jalan kondisi rusak ringan dan rusak berat menjadi baik.

Capaian indikator Tingkat kemantapan jalan Provinsi (%) merupakan perbandingan kondisi jalan yang telah ditangani dan dipelihara menjadi kondisi mantap (baik dan sedang) dibanding dengan total seluruh panjang ruas jalan provinsi. Maka dilihat dari hasil capain pada Tw 4, maka target RPJMD di akhir tahun 2023 dengan nilai persentase kemantapan jalan provinsi sebesar 78,27 % dapat tercapai.

Analisis keberhasilan mencapai target dapat dinilai dari Panjang penanganan di tahun tersebut cukup menambah tingkat kemantapan jalan, dengan menangani kondisi rusak ringan dan rusak berat yang datanya diperoleh dari hasil inspeksi kondisi jalan tahun 2022 (DD1).

SOLUSI

Fokus dalam menangani ruas jalan provinsi yang kondisi jalannya belum mantap melalui Rekonstruksi Jalan oleh Bidang Bina Marga dan menjaga kondisi mantap jalan provinsi tetap mantap melalui pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh UPTD 1, 2 dan 3.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang terjadi adalah dalam mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang. Banyaknya kendaraan angkutan yang melebihi ketentuan daya angkut dan dimensi yang telah ditetapkan (ODOL), baik sawit, tambang maupun logging yang melintas pada ruas jalan provinsi, mengakibatkan kondisi mantap mengalami penurunan, seperti yang terjadi di ruas jalan simp. 4 Kaliorang – Talisayan dan Tanjung Redeb – Talisayan.

Sebagai contoh pada akhir tahun 2022 kondisi jalan sedang pada ruas Jalan Simp. 4 Kaliorang – Talisayan semula 141,09 km, namun pada akhir 2023 kondisi sedang turun menjadi 124,35 km. Sedangkan kondisi rusak berat di tahun 2022 19,83 km menjadi 61,47 km.

SOLUSI ALTERNATIVE

Melakukan kordinasi dengan Pemerintah Pusat yakni Kementerian PUPR dalam mengajukan usulan alternatif pendanaan melalui program bantuan pemerintah pusat seperti Inpres Jalan Daerah (IJD) dan DAK.

Analisis efisinsi dari sasaran strategis meningkatnya konektivitas antar kawasan berikut ini menghasilkan capaian persentase fisik 99,84% dan melakukan penyerapan anggaran sebesar 90,03% dari 1 program yang mendukung.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Fisik	% Anggaran
1	Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Tingkat kemantapan jalan provinsi	99,84	90,03

PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

PROGRAM:

- Program Penyelenggaraan Jalan

KEGIATAN:

- Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Sasaran 2 : Menurunnya Luas Kawasan Kumuh dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni.

Sedangkan pada sasaran berikut ini, yaitu Menurunnya Luas Kawasan Kumuh dan Jumlah Rumah Tidak Layak huni guna bisa memberikan lingkungan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat di tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 22. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Luas Kawasan Kumuh	Ha	1.137,82	1.097,2	176

Realisasi Kinerja dari Tahun 2022 s/d 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	% Peningkatan/Penurunan Tahun 2023
1	2	3	4	5	6= ()/4*100
1	Luas Kawasan Kumuh	Ha	1.185,14	1.097,2	70

Realisasi Kinerja 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Luas Kawasan Kumuh	Ha	1.097,2	1.137,82	176

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Capaian sasaran ini juga didukung oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Pusat melalui APBN.

SOLUSI

-

PERMASALAHAN.

Di beberapa daerah Kabupaten / Kota melakukan Update SK Kumuh sehingga Kewenangan Penanganannya juga berubah.

SOLUSI ALTERNATIVE

Sinergi penanganan kawasan kumuh bersama instansi vertikal maupun instansi terkait lainnya.

Analisis efisiensi dari sasaran strategis Menurunnya Luas Kawasan Kumuh dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni ini menghasilkan capaian persentase fisik sebanyak 100% dan melakukan penyerapan anggaran sebesar 99,65% dari 2 program yang mendukung.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Fisik	% Anggaran
1	Menurunnya luas Kawasan Kumuh dan jumlah rumah tidak layak huni	Luas Kawasan Kumuh	100%	99,65%

PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

PROGRAM:

- Program Kawasan Permukiman.
- Program Peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU)

KEGIATAN:

- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
- Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.

Sasaran 3 : Tercapainya SPM Bidang Perumahan.

Sedangkan pada sasaran berikut ini, yaitu Tercapainya SPM Bidang Perumahan bagi masyarakat di tahun 2023 sebagai berikut

Tabel 23. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Skoring Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan	%	55	73	133

Realisasi Kinerja dari Tahun 2022 s/d 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	% Peningkatan/Penurunan Tahun 2023
1	2	3	4	5	6= (5-4)/4*100
1	Skoring Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan	%	68	73	125

Realisasi Kinerja 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Skoring Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan	%	73	55	133

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Skoring penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan yang diperoleh dari data pelaporan SPM Provinsi Kalimantan Timur oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota se-kalimantan timur yang mana hasilnya lebih dominan sudah mencapai tuntas paripurna.

SOLUSI

-

PERMASALAHAN.

Belum adanya Kerjasama antar stakeholder untuk mendukung pelaksanaan SPM Perumahan di Provinsi Kalimantan Timur.

SOLUSI ALTERNATIVE

Kolaborasi bersama stakeholder dan instansi terkait.

Analisis efisiensi dari sasaran strategis Tercapainya SPM Bidang Perumahan ini menghasilkan capaian persentase fisik sebanyak 100% dan melakukan penyerapan anggaran sebesar 98.01 % dari 1 program yang mendukung.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Fisik	% Anggaran
1	Tercapainya SPM Bidang Perumahan	Skoring Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan	100%	98,01%

PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

PROGRAM:

- Program Pengembangan Perumahan

KEGIATAN:

- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Sasaran 4 : Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Ke-ciptakarya-an

Dalam sasaran berikut ini, yaitu Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Ke-ciptakarya-an guna bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi buat masyarakat selama kegiatan berjalan di tahun 2023.

Tabel 24. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Capaian akses Air Minum layak perpipaan	%	68,64	73.92	107.69
2	Capaian akses penanganan sampah domestik	%	71,37	73.51	103,00
3	Capaian akses air limbah domestik layak	%	87,27	83.84	96,07
4	Persentase jumlah Gedung dan bangunan lingkungan yang tertata	%	100	100	100

Realisasi Kinerja dari Tahun 2022 s/d 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	% Peningkatan/Penurunan Tahun 2023
1	2	3	4	5	6= (5-4)/4*100
1	Capaian akses Air Minum layak perpipaan	%	69,67	73.92	6.10
2	Capaian akses penanganan sampah domestik	%	73,51	73.51	0
3	Capaian akses air limbah domestik layak	%	81,79	83.84	2.51
4	Persentase jumlah Gedung dan bangunan lingkungan yang tertata	%	95,16	100	5,09

Realisasi Kinerja 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Capaian akses Air Minum layak perpipaan	%	73.92	68,64	107.69
2	Capaian akses penanganan sampah domestik	%	73.51	71,37	103,00
3	Capaian akses air limbah domestik layak	%	83.84	87,27	96,07
4	Persentase jumlah Gedung dan bangunan lingkungan yang tertata	%	100	100	100

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. **Air Minum Layak**

   Capaian akses air minum layak perpipaan ditentukan oleh besarnya jumlah sambungan rumah tangga (layanan jiwa) terhadap akses air minum JP, baik oleh PDAM/Non PDAM. Capaian ini bersifat kumulatif, dengan tingkat keberhasilan capaian yang dipengaruhi oleh kombinasi peran dari pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), serta sebagian kecil dari peran swasta. Sampai dengan tahun 2021, Pemerintah banyak fokus terhadap pembangunan SPAM mulai dari Intake Air Baku dan IPA, sehingga peningkatan capaian belum bisa maksimal, dikarenakan pembangunan JDU dan Sambungan Rumah masih minim, ditambah lagi dampak Covid-19 masih ada. Beberapa PDAM belum mampu menambah jumlah SR, dikarenakan beberapa faktor, yakni krisis air baku, kurangnya kapasitas IPA serta masih adanya idle capacity. Ditahun 2022 pemerintah mulai fokus melanjutkan proyek 2021 (sebagian) dan membangun JDU (provinsi), dan dilanjutkan sampai dengan pemasangan Sambungan Rumah (SR) oleh Pemda Kabupaten/Kota dan PDAM. Oleh karena itu di tahun 2022, terjadi peningkatan capaian yang cukup signifikan.

2. **Penanganan Persampahan**

   Capaian penanganan sampah ditentukan oleh besarnya sampah yang ditangani sejak tahap pengumpulan/pengangkutan sampai dengan Pemrosesan akhir di TPA/TPST/TPS3R. Capaian ini bersifat kumulatif, dengan tingkat keberhasilan capaian yang dipengaruhi oleh kombinasi peran dari pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), serta sebagian kecil dari peran swasta. Ditahun

2021, data capaian penanganan sampah masih belum optimal dari Kabupaten/Kota. Beberapa TPA masih membutuhkan lahan zona landfill untuk penanganan sampah akhir, beberapa TPST/TPS3R belum optimal beroperasi. Tahun 2021-2022 terus dilaksanakan pembinaan kepada Pemda/Masyarakat di Kabupaten/Kota terkait pengelolaan sampah, perbaikan data baseline persampahan melalui aplikasi SIPSN, serta telah banyak juga difasilitasi peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah (TPA/TPST/TPS3R) di Kabupaten/Kota, sehingga terjadi peningkatan penanganan sampah, baik berdasarkan perbaikan data maupun peningkatan capaian layanan.

3. **Air Limbah Layak**

   Capaian akses pengolahan air limbah domestik ditentukan oleh banyaknya rumah tangga (satuan jiwa penduduk) yang memiliki fasilitas pengolahan tangki septik SNI dan/atau yang terlayani Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Capaian ini bersifat kumulatif, dengan tingkat keberhasilan capaian yang dipengaruhi oleh kombinasi peran dari pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), serta sebagian kecil dari peran swasta. Ditahun 2021, data capaian akses air limbah domestik layak masih belum optimal dari Kabupaten/Kota. Beberapa data by name by address pemilik tangki septik terstandar serta data layanan IPALD dan IPLT belum optimal. Tahun 2021-2022 terus dilaksanakan pembinaan kepada Pemda/Masyarakat di Kabupaten/Kota terkait pengelolaan air limbah domestik, perbaikan data layanan IPALD/IPLT yang dioptimalkan, serta beberapa Kabupaten/Kota difasilitasi untuk mendapatkan DAK Sanitasi (pembangunan tangki septik/IPALD permukiman), sehingga oleh karena itu terjadi peningkatan capaian layanan akses air limbah domestik layak.

4. **Gedung dan Bangunan Lingkungan yang Tertata**

   Capaian indikator Persentase jumlah gedung dan bangunan lingkungan yang tertata (%) ini merupakan kumulatif dari target pembangunan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, dimana target 5 tahunan untuk pembangunan bangunan gedung sebanyak 85 unit, dan pembangunan bangunan lingkungan sebanyak 39 unit. Capaian 95,16% merupakan kumulatif capaian tahun 2022 (tahun ke 4) yang telah membangun sesuai target 80 unit Bangunan Gedung ditambah 38 unit Bangunan Lingkungan, total 118 unit, dibagi dengan total 124 target unit dalam 5 tahun.

SOLUSI

1. **Air Minum Layak**

   Pemda Provinsi, melalui Dinas PUPR-PERA Prov. Kaltim sedang mempersiapkan penyelenggaraan beberapa SPAM Regional untuk membantu permasalahan krisis air baku di Kota Bontang (saat ini masih dalam tahap perencanaan). Kemudian sebagai upaya meningkatkan peran Kabupaten/Kota dalam hal pengarusutamaan kegiatan air minum serta peningkatan pendanaan kegiatan air minum, maka Dinas PUPR-PERA Prov. Kaltim telah melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan air minum (melalui Kegiatan SPM dan AMPL), serta memaksimalkan fasilitasi dana Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Air Minum di Kabupaten/Kota.

2. **Penanganan Persampahan**

   Peningkatan peran pokja AMPL Kaltim menjadi wadah dalam koordinasi dan integrasi antar perangkat daerah terkait dalam meningkatkan capaian pengelolaan sampah di Kaltim; meningkatkan peran pembinaan provinsi ke Kabupaten/Kota; serta mengupayakan penyelenggaraan pengelolaan sampah regional lintas Kabupaten/Kota.

3. **Air Limbah Layak**

   Peningkatan peran pokja AMPL Kaltim menjadi wadah dalam koordinasi dan integrasi antar perangkat daerah terkait dalam meningkatkan capaian pengelolaan air limbah domestik di Kaltim; meningkatkan peran pembinaan provinsi ke Kabupaten/Kota; serta mengupayakan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

4. **Gedung dan Bangunan Lingkungan yang Tertata**

   Untuk beberapa kondisi diperlukan review perencanaan; diperlukan koordinasi/konsultasi dengan beberapa pihak terkait perencanaan (misalnya inspektorat, owner bangunan, dll)

PERMASALAHAN

1. **Air Minum Layak**

   Beberapa Kabupaten/Kota memiliki keterbatasan fiskal untuk mendukung kegiatan air minum, pengarusutamaan kegiatan air minum juga masih belum optimal, ditambah lagi dukungan Pemda Provinsi yang telah dibatasi oleh wewenang regionalisasi SPAM oleh karena implementasi Permendagri 90/2019 dan turunannya Kepmendagri 050/2021. Dibeberapa wilayah (Bontang,

Balikpapan, dan PPU) juga mulai mengalami krisis air baku, sehingga menghambat peningkatan capaian dan bahkan berpotensi menurunkan capaian layanan.

2. **Penanganan Persampahan**

   Manajemen data baseline persampahan masih kurang valid ; beberapa daerah masih kesulitan lahan dalam pembangunan TPA/TPST/TPS3R ; perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang, unit pengangkut sampah kondisinya kurang baik serta kekurangan jumlah armada ; sebagian besar TPA masih menggunakan sistem open dumping, atau maksimal controlled landfill ; persampahan tidak masuk menjadi indikator SPM Kepala Daerah , sehingga masih belum diprioritaskan ; keterbatasan wewenang penyelenggaraan pengelolaan sampah (regionalisasi), dan belum adanya kerjasama terkait pembangunan TPA Regional di Kaltim hingga saat ini.

3. **Air Limbah Layak**

   Penyelenggaraan Sanitasi masih belum menjadi Prioritas Pembangunan Daerah. masih sedikit usulan dari kabupaten/Kota terkait kegiatan sanitasi ; Manajemen data baseline air limbah masih kurang valid ; Permasalahan air limbah masih didominasi oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, diatas laut, yang notabennya sulit untuk di relokasi ; Perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih kurang ; Penyelenggaraan SPALD Regional masih belum ada dilaksanakan serta belum adanya kerjasama terkait pembangunan SPALD Regional.

4. **Gedung dan Bangunan Lingkungan yang Tertata**

   Beberapa kondisi, masih terdapat selisih perbedaan tahun perencanaan dan tahun pembangunan yang lebih dari 3 tahun, yang menyebabkan perbedaan harga real saat pembangunan, sehingga mempengaruhi kuantitas/kualitas pekerjaan ; Terdapat beberapa pekerjaan pembangunan yang tidak didukung oleh perencanaan yang baik dan relevan ; Kendala penyiapan lahan/lokasi pembangunan ; Dalam kondisi tertentu, cukup sulit merealisasikan pembangunan yang memerlukan perencanaan di tahun yang sama.

SOLUSI ALTERNATIVE

Analisis efisiensi pada sasaran strategis Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Ke-ciptakarya-an berikut ini dari 4 indikator kinerja

menghasilkan capaian persentase fisik sebesar 85.41 % dan melakukan penyerapan anggaran sebanyak 83.35 % dari 6 program yang mendukung.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Fisik	% Anggaran
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Ke-ciptakarya-an	Capaian akses Air Minum layak perpipaan	85.41	83.35
		Capaian akses penanganan sampah domestik		
		Capaian akses air limbah domestik layak		
		Persentase jumlah Gedung dan bangunan lingkungan yang tertata		

PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

PROGRAM:

- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
- Program penataan bangunan gedung
- Program penataan bangunan dan lingkungannya
- Program pengembangan permukiman

KEGIATAN:

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
- Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 5 : Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air.

Pada sasaran berikut ini yaitu meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur Sumber Daya Air. Secara rinci pencapaian target dan outcome kegiatan Sumber Daya Air dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Lanjutan Pembangunan Drainase DI Panjaitan Kota Samarinda (Sistem Sungai Karang Mumus) dengan Panjang Saluran Drainase terbangun sepanjang 460 meter dan capaian outcome pengendalian banjir seluas 6,0 Hektar.
2. Pengendalian Banjir Semani (Sentosa-Remaja-A.Yani) dengan Panjang kanal banjir terbangun sepanjang 340 meter dengan outcome pencapaian pengendalian banjir seluas 7,3 Ha.
3. Pengendalian Banjir Loa Ipuh dengan Panjang kanal banjir terbangun sepanjang 196 meter dengan outcome pencapaian pengendalian banjir seluas 8,1 Ha.
4. Pengendalian Banjir Sungai Marangkayu Kec. Marangkayu dengan Panjang sungai yang dinormalisasi sepanjang 1.675 meter dengan outcome pencapaian pengendalian banjir seluas 11 Ha.
5. Lanjutan Normalisasi Sungai Sangatta dengan Panjang sungai yang dinormalisasi sepanjang 1.000 meter dengan outcome pencapaian pengendalian banjir seluas 12,6 Ha.
6. Pengendalian Banjir Sistem Karang Asam Besar Kota Samarinda dengan Panjang normalisasi sungai sepanjang 1.050 meter dengan outcome pencapaian pengendalian banjir seluas 15,0 Ha.
7. Normalisasi Sungai Karangmumus
   Normalisasi Sungai dengan Panjang normalisasi sungai sepanjang 3.042,5 meter dengan outcome pencapaian pengendalian banjir seluas 14,8 Ha.
8. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Biduk-Biduk terbangun bangunan pelindung pantai sepanjang 751,8 meter.
9. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Sandaran terbangun bangunan pelindung pantai sepanjang 60 meter.
10. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Tanjung Jumlai terbangun bangunan pelindung pantai sepanjang 434 meter.
11. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Merancang terbangun Profil Saluran Irigasi Sekunder sepanjang 1.357 meter.

12. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Semurut Buyung-Buyung terbangun Profil Saluran Irigasi Sekunder sepanjang 800 meter.
13. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Biatan terbangun Profil Saluran Irigasi sepanjang 3.970 meter.
14. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Labanan terbangun Profil Saluran Irigasi Sekunder sepanjang 841 meter.
15. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Suliliran terbangun Profil Saluran Irigasi Primer sepanjang 3.349 meter.
16. Peningkatan Jaringan irigasi D.I Sungai Buluh terbangun Saluran Pembawa dengan rincian saluran pembawa primer sepanjang 967 meter dan 330,2 meter, saluran pembawa sekunder sepanjang 437 meter.

Tabel Indikator Kinerja
Luas Lahan Pertanian yang Beririgasi

No	Paket	Indikator Output		Outcome	
		Rencana 2023	**Realisasi 2023**	**Rencana 2023**	**Realisasi 2023**
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Labanan (DAK Penugasan)	1 Unit Bendung	1 Unit Bendung	75 Ha	82 Ha
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Biatan Kab. Berau	1.528 M	3.970 M	75 Ha	81 Ha
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Labanan Kab. Berau	1.528 M	841 M	75 Ha	75 Ha
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Merancang Kab. Berau	1.284 M	1.357 M	75 Ha	81 Ha
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Semurut Buyung-Buyung Kab. Berau	1.528 M	800 M	75 Ha	75 Ha
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sungai Buluh Kab. Kutai Kartanegara	1.383 M	1.734,2 M	75 Ha	63 Ha
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Rawa Suliliran Kab. Paser	1.110 M	3.349 M	50 Ha	62 Ha
TOTAL		**8.361 M**	**12.051, 2 M**	**500 Ha**	**519 Ha**

Tabel Indikator Kinerja
Luas Genangan Banjir Perkotaan

No	Paket	Indikator Output		Outcome	
		Rencana 2023	**Realisasi 2023**	**Rencana 2023**	**Realisasi 2023**
1	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Karang Asam Besar Kota	425 M	1.050 M	11,0 Ha	15,0 Ha

	Samarinda (Swakelola Tipe I)				
2	Pengendalian Banjir Loa Ipuh Kab. Kukar	155 M	196 M	5,0 Ha	8,1 Ha
3	Normalisasi Sungai Marangkayu	566 M	1.675 M	10,0 Ha	11,0 Ha
4	Lanjutan Pengendalian Banjir Semani (Sentosa-Remaja-A.Yani)	132 M	340 M	6,0 Ha	7,3 Ha
5	Normalisasi Sungai Karangmumus Kota Samarinda (Swakelola Tipe II)	2.782 M	3.042,5 M	15,0 Ha	14,8 Ha
6	Lanjutan Normalisasi Sungai Sangatta (Swakelola Tipe II)	797 M	1.000 M	15,0 Ha	12,6 Ha
7	Lanjutan Pembangunan Drainase DI Panjaitan Kota Samarinda (Sistem Sungai Karang Mumus)	108 M	460 M	5,0 Ha	6,0 Ha
8	Lanjutan Pembangunan Drainase Sekunder Depsos Atas Kota Balikpapan	120 M	228 M	7,0 Ha	7,1 Ha
9	Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak Dalam Kota Samarinda	96 M	30 M	10,0 Ha	2,3 Ha
10	Pengendalian Banjir Sistem Sungai Bontang (Swakelola Tipe II)	226 M	7.425 M	6,0 Ha	7,2 Ha
11	Normalisasi Sungai di Kota Samarinda (Swakelola Tipe II)	1131 M	16.100 M	15,0 Ha	18,0 Ha
TOTAL		**6.538 M**	**31.546,5 M**	**105 Ha**	**109,4 Ha**

Tabel Indikator Kinerja
Panjang Pantai Kritis

No	**Paket**	**Indikator Output**		**Outcome**	
		Rencana 2023	**Realisasi 2023**	**Rencana 2023**	**Realisasi 2023**
1	Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Biduk-Biduk	578 M	751,8 M	20 Ha	28,5 Ha
2	Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Sandaran	165 M	60 M	10 Ha	10 Ha
3	Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Tanjung Jumlai	215 M	434 M	10 Ha	12 Ha
TOTAL		**958 M**	**1.245,8 M**	**40,0 Ha**	**50,5 Ha**

Tabel 25. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Persentase Capaian Layanan Sumber Daya Air	%	78,91	92,33	117
2	Panjang Saluran Drainase Yang Berfungsi Baik	Meter	3.455	3.977,7	115,13

Realisasi Kinerja dari Tahun 2022 s/d 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	% Peningkatan/Penurunan Tahun 2023
1	2	3	4	5	6= (5-4)/4*100
1	Persentase Capaian Layanan Sumber Daya Air	%	76,95	92,33	19,98
2	Panjang Saluran Drainase Yang Berfungsi Baik	Meter	2.723,7	3.977,7	46

Realisasi Kinerja 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 =4/5*100
1	Persentase Capaian Layanan Sumber Daya Air	%	92,33	78,91	117
2	Panjang Saluran Drainase Yang Berfungsi Baik	Meter	3.977,7	3.455	115,13

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

- ✓ Persiapan penyiapan lahan.
- ✓ Koordinasi antar Instansi
- ✓ Sosialisasi terhadap pemilik lahan

SOLUSI

- ✓ Memantapkan persiapan tahapan penyiapan lahan
- ✓ Meningkatkan Koordinasi antar Instansi terkait
- ✓ Pelaksanaan sosialisasi terhadap pemilik lahan.

PERMASALAHAN

- ✓ Pelaksanaan konstruksi bersamaan dengan proses pengadaan lahan
- ✓ Terdapat pemilik lahan yang tidak diketahui identitas nya

SOLUSI ALTERNATIVE

- ✓ Mempersiapkan Dokumen perencanaan pengadaan tanah
- ✓ Melaksanakan koordinasi H-1 tahun pelaksanaan pekerjaan fisik
- ✓ Melaksanakan pemberitahuan dan sosialisasi kepada pemilik lahan dan koordinasi dengan Pemerintah setempat.

Analisis efisiensi dari sasaran strategis Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air Bagi masyarakat yaitu menghasilkan capaian persentase fisik sebesar 98,17% dari 2 indikator kinerja dan penyerapan anggaran sebanyak 86,48% dengan 2 program yang mendukung.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Fisik	% Anggaran
1	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Persentase Capaian Layanan Sumber Daya Air	98,17	86,48
		Panjang Saluran Drainase Yang Berfungsi Baik		

PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

PROGRAM:

1. Program pengelolaan sumber daya air.
2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.

KEGIATAN:

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi.

Sasaran 6 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dalam sasaran strategis ini yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai acuan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan,guna meningkatkan kinerja yang mampu mendukung wilayah provinsi di bidang penataan

ruang.Pada Tahun 2023 skoring penyelenggaraan penataan ruang telah melampaui target dari yang ingin dicapai.

Tabel 26. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=5/4*100**
1	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	83,10	83,10	100

Realisasi Kinerja dari Tahun 2022 s/d 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	% Peningkatan/Penurunan Tahun 2023
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6= (5-4)/4*100**
1	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	78,57	83,10	113,25

Realisasi Kinerja 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=4/5*100**
1	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	83,10	83,10	100

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042.
2. Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota sedang berjalan
3. Menilai Rasio pemenuhan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi.
4. Kajian Perubahan Fungsi, Peruntukan Ruang dan Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang pada tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur telah tersusun.
5. Kajian Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dalam proses pengumpulan data dan analisa keruangan.

   Fasiltasi Penertiban dari Audit Tata Ruang pada KSN Teluk Balikpapan dan Kaskade Mahakam telah terlaksana hingga perumusan pengenaan sanksi administrasi.

SOLUSI ALTERNATIVE

-

PERMASALAHAN

Pelaksanaan pemanfaatan ruang di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal dikarenakan sistem pelayanan penerbitan kesesuain kegiatan pemanfaatan ruang belum komprehensif.

SOLUSI

Adanya Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Analisis efisiensi dari sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang ini adalah menghasilkan 100% capaian persentase fisik dan penyerapan anggaran sebanyak 90,5% dengan 1 program yang mendukung. SiLPA anggaran pada Bidang Penataan Ruang dikarenakan adanya selisih antara pagu dan kontrak pada paket kontrak dengan metode seleksi) dan beberapa optimalisasi belanja perjalanan dinas dan belanja makanan dan minuman rapat.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Fisik	% Anggaran
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	100	90,5

PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

PROGRAM:

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

KEGIATAN:

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.

Sasaran 7 : Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Jasa Konstruksi.

Pada sasaran Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi ini, yaitu melakukan kegiatan peningkatan daya saing tenaga kerja jasa konstruksi di masyarakat

Tabel 27. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=5/4*100**
1	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	36,06	41,70	115,64

Realisasi Kinerja dari Tahun 2022 s/d 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	% Peningkatan/Penurunan Tahun 2023
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6= (5-4)/4*100**
1	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	36,51	41,70	115,64

Realisasi Kinerja 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=4/5*100**
1	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	41,70	36,06	115,64

ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Keberhasilan Sub Urusan Jasa Konstruksi Tahun 2023 :

1. Penghargaan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka hari Konstruksi Indonesia Tahun 2023 diberikan kepada Provinsi Kalimantan Timur Peringkat Terbaik II Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub-Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi, Peringkat I Provinsi Jawa Tengah, Peringkat III Provinsi Kalimantan Utara

SOLUSI

1. Program prioritas sub urusan jasa konstruksi pada RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024 - 2026 dengan target tiap tahun 1.500 orang untuk kualifikasi Ahli.

2. Pada tanggal 29 Januari s.d 1 Februari 2024 telah dilaksanakan pelatihan dan sertifikasi 13 kelas serentak Samarinda, Balikpapan, Bontang dan PPU
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan keuangan spesifik pada 10 Kab/Kota se Kalimantan Timur yang siap melaksanakan pada tahun 2024 Samarinda, Bontang, Kutai Timur, Mahakam Ulu, PPU dan Berau
4. SIBIKON adalah perangkat pendukung SIPJAKI untuk mempermudah dan mempercepat data dan informasi berbasis digitalisasi
5. Telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah
6. Dilakukan evaluasi langsung ke Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas PUPR PERA Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 600.2.14.2/231/BID.BIKON, Tanggal 23 Januari 2024 Hal : Koordinasi & Evaluasi terkait Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

PERMASALAHAN

1. NSPK yg ditetapkan oleh pusat sangat dinamis perubahannya, provinsi wajib melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat jasa konstruksi Kalimantan Timur
2. Terdapat kabupaten kota yg belum membentuk kelembagaan sub urusan jasa konstruksi sehingga kewenangan belum maksimal dilaksanakan, yaitu kabupaten Berau dan Kota Balikpapan
3. Hampir semua kabupaten kota belum memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
4. Pembinaan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah belum maksimal dilakukan karena terdapat 21 kewenangan
5. Keterbatasan kewenangan karena penyelenggaran tenaga teknisi/analis dan operator (terampil) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota masih terjadi Gap 58,30 % didominasi oleh tenaga kerja konstruksi kualifikasi teknisi/ analis dan operator (terampil)
6. Kabupaten Kota belum semua dapat menyelenggarakan kewenangan terutama penyelenggara tenaga kualifikasi teknisi/analis dan operator (terampil)karena keterbatasan anggaran., dan pada tahun 2024 dialokasikan 6 kabupaten/kota mendapatkan anggaran bantuan keuangan spesifik yaitu : Bontang, Samarinda, Kutai Timur, Mahakam Ulu, PPU dan Berau

7. Jumlah asesor yang masih terbatas, saat ini yang telah dilakukan pelatihan sertifikasi oleh Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2022 sd 2023 sebanyak 94 orang dan target pada tahun 2024 sebanyak 120 orang
8. Beberapa skema pada jabker kualifikasi ahli yg sd saat ini belum bisa dilaksanakan sertifikasi nya masih proses di BNSP.

SOLUSI ALTERNATIVE

-

Analisis efisiensi pada sasaran strategis meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi berikut ini menghasilkan persentase capaian persentase fisik sebesar 80,09 % serta melakukan penyerapan anggaran sebanyak 95,04% dengan adanya 1 program yang mendukung.

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	% Fisik	% Anggaran
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	80,09	95,04

PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

PROGRAM:

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

KEGIATAN:

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.
- Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

3.4 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 28. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	SASARAN STRATEGIS	%Fisik	%Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya konektivitas antar kawasan	99,84	90,03	9,97
2	Menurunnya luas kawasan kumuh dan jumlah rumah tidak layak huni	100	99,65	0,35
3	Tercapainya SPM bidang perumahan	100	98,01	1,99

4	Meningkat nya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an	85.41	83.35	16,65
5	Meningkat nya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	98,17	86,48	13,52
6	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	100	90,5	9,5
7	Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	80,09	95,04	4,96

3.5 REALISASI ANGGARAN

Tabel 29. Effisiensi penggunaan anggaran

1	**2022**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**174.734.395.080,00**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.219.961.500,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.136.877.902,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	475.633.500,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.155.994.978,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.574.100.000,00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.976.468.333,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.323.434.760,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	UPTD wilayah I	13.833.809.693,00
			UPTD wilayah II	27.202.018.010,00
			UPTD wilayah III	27.636.795.950,00
			UPTD Lab Konstruksi	6.199.300.454,00
		Penyelenggaraan Jalan		**936.077.470.645,00**
			Penyelenggaraan Jalan Provinsi	788.197.691.713,00

			UPTD wilayah I	36.347.678.831,00
			UPTD wilayah II	44.099.305.550,00
			UPTD wilayah III	67.432.794.551,00
		Program peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU)		**43.429.770.275,00**
			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	43.429.770.275,00
		Program kawasan permukiman		**43.919.674.978,00**
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	43.919.674.978,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum		**167.249.167.064,00**
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	167.249.167.064,00
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional		**100.000.000,00**
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	100.000.000,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		**761.160.000,00**
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	761.160.000,00
		Program pengembangan perumahan		**879.942.000,00**
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	879.942.000,00
		Program penataan bangunan gedung		**210.235.710.434,00**

			Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	209.235.567.886,00
			UPTD wilayah I	1.000.142.548,00
		Program penataan bangunan dan lingkungannya		**100.425.721.528,00**
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.425.721.528,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		**131.120.744.103,00**
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	81.977.240.333,00
			UPTD wilayah I	499.956.159,00
			UPTD wilayah II	955.596.450,00
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22.351.920.192,00
			UPTD wilayah I	9.725.924.475,00
			UPTD wilayah II	8.599.106.494,00
			UPTD wilayah III	7.011.000.000,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		**15.287.834.120,00**
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	10.739.754.460,00
			UPTD wilayah II	4.548.079.660,00

		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		**8.578.763.700,00**
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	2.983.661.900,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.579.589.900,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.772.415.500,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	2.243.096.400,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi		**8.278.230.000,00**
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	6.422.908.400,00
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	547.274.000,00
			Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1.308.047.600,00
		Program penelitian dan pengembangan daerah		**856.080.000,00**
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	856.080.000,00
Total		**15 Program**	**27 kegiatan**	**1.841.934.663.927,00**

2	**2023**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**174.734.395.080,00**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.869.857.000,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.084.718.449,00
			UPTD wilayah I	342.240.000,00
			UPTD wilayah II	343.200.000,00

			UPTD wilayah III	366.020.000,00
			UPTD Lab Konstruksi	120.840.000,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.549.505.500,00
			UPTD wilayah I	420.858.500,00
			UPTD wilayah II	295.335.000,00
			UPTD wilayah III	336.055.000,00
			UPTD Lab Konstruksi	227.856.200,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.569.899.450,00
			UPTD wilayah I	900.980.100,00
			UPTD wilayah II	940.497.796,00
			UPTD wilayah III	1.093.416.760,00
			UPTD Lab Konstruksi	2.296.914.422,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.794.225.200,00
			UPTD wilayah I	2.224.837.420,00
			UPTD wilayah II	184.585.600,00
			UPTD wilayah III	40.176.000,00
			UPTD Lab Konstruksi	771.238.300,00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.296.348.840,00
			UPTD wilayah I	2.229.879.920,00
			UPTD wilayah II	3.492.615.760,00
			UPTD wilayah III	3.790.894.280,00
			UPTD Lab Konstruksi	2.232.136.720,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.235.021.000,00
			UPTD wilayah I	1.708.995.600,00
			UPTD wilayah II	2.062.276.540,00
			UPTD wilayah III	2.082.204.640,00
			UPTD Lab Konstruksi	501.403.700,00

		Penyelenggaraan Jalan		**2.366.773.671.958,00**
			Penyelenggaraan Jalan Provinsi	2.195.394.894.982,00
			UPTD wilayah I	31.834.212.762,00
			UPTD wilayah II	44.644.428.876,00
			UPTD wilayah III	94.900.135.338,00
		Program kawasan permukiman		**78.973.864.461,00**
			Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	503.253.200,00
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	78.470.611.261,00
		Program peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU)		**235.618.921.548,00**
			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	235.618.921.548,00
		Program pengembangan perumahan		**2.349.043.830,00**
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.349.043.830,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum		**41.495.427.368,00**
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	41.495.427.368,00
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional		**1.539.208.500,00**
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.539.208.500,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		**2.378.060.500,00**

			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	2.378.060.500,00
		Program penataan bangunan gedung		**859.637.386.072,00**
			Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	855.835.139.477,00
			UPTD wilayah I	3.802.246.595,00
		Program penataan bangunan dan lingkungannya		**90.485.964.441,00**
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	90.485.964.441,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		**206.753.006.006,00**
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	144.796.083.019,00
			UPTD wilayah I	3.001.001.900,00
			UPTD wilayah II	549.378.500,00
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35.248.280.587,00
			UPTD wilayah I	7.864.200.000,00
			UPTD wilayah II	8.881.882.000,00
			UPTD wilayah III	6.412.180.000,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		**35.289.332.326,00**
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah	29.086.048.826,00

			Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	
			UPTD wilayah II	6.203.283.500,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		**24.093.527.900,00**
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	18.105.474.300,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.158.460.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	2.029.948.600,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	2.799.645.000,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi		**13.160.764.800,00**
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	7.671.610.800,00
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	781.882.000,00
			Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	4.707.272.000,00
		Program penelitian dan pengembangan daerah		**1.210.206.000,00**
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.210.206.000,00
Total		**15 Program**	**27 kegiatan**	**4.092.163.419.407,00**

Tabel Rekap Effisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2022-2023

No	Tahun	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2022	15	27	1.841.934.663.927,00
2	2023	15	27	4.092.163.419.407,00
Effisiensi		-	-	2.250.228.755.480,00

Tabel Rekap Effisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2022-2023

Thn	Anggaran belanja	Realisasi	Nilai effisiensi	%	Total APBD non gaji		Jumlah program/kegiatan yg dialokasikan		Total program/kegiatan	
					Belanja pegawai	Belanja gaji & tunjangan	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	1.841.934.663.927,00	1.596. 490.648.508,00	0,17	86,67	67.959.314.711,42	0	16	27	15	27
2023	4.092.163.419.407,00	3.551.598.079.366,00	0,17	86,79	61.485.995.482	0	15	27	15	27

1 **3.D. REALISASI ANGGARAN**

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tabel 30. Laporan Realisasi Anggaran

Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran			Realisasi	Sisa Pagu	Persentase Capaian
	Murni	Perubahan (ABT)	Total Anggaran			
Dinas + UPTD	*3.076.384.083.142,00*	*+1.015.779.336.265,00*	*4.092.163.419.407,00*	*3.551.598.079.366,00*	*540.565.340.041,00*	86,79 %
DINAS	2.845.406.062.529,00	1.008.448.743.149,00	3.853.854.805.678,00	3.316.442.316.653,00	537.412.489.025,00	86,06 %
UPTD Wilayah 1	52.329.452.197,00	2.000.000.600,00	54.329.452.797,00	53.789.593.461,00	539.859.336.00	99,01 %
UPTD Wilayah 2	63.309.993.896,00	4.287.489.676,00	67.597.483.572,00	67.279.704.922,00	317.778.650,00	99,53 %
UPTD Wilayah 3	108.478.247.338,00	542.834.680,00	109.021.082.018,00	107.035.951.419,00	1.985.130.599,00	98,18 %
UPTD Lab Bahan Konstruksi	6.860.327.182,00	500.268.160,00	7.360.595.342,00	7.050.512.911,00	310.082.431,00	95,79 %

2. ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM APBD 2023

Tabel 31. Anggaran dan Realisasi Program APBD Dinas PUPR & PERA Tahun 2023

Sasaran Strategis	Anggaran					
	Program	PAGU			Realisasi	% Capaian
		Murni	Perubahan (ABT)	Total Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7
1. Meningkatkan konektivitas antar kawasan	1. Program Penyelenggaraan Jalan	**1.618.990.948.339,00**	**+747.782.723.619,00**	**2.366.773.671.958,00**	**2.146.286.738.394,00**	**90,68 %**
	Dinas	1.453.004.522.039,00	+742.390.372.943,00	2.195.394.894.982,00	1.976.580.133.758,00	90,03 %
	UPTD Wilayah I	29.955.751.762,00	+1.878.461.000,00	31.834.212.762,00	31.667.380.418,00	99,48 %
	UPTD Wilayah II	41.130.539.200,00	+3.513.889.676,00	44.644.428.876,00	44.624.075.407,00	99,95 %
	UPTD Wilayah III	94.900.135.338,00	-	94.900.135.338,00	93.415.148.811,00	98,44 %
2. Menurunnya Luas kawasan kumuh dan Jumlah Rumah Tidak layak huni	2. Program kawasan permukiman	**77.257.769.760,00**	**+1.716.094.701,00**	**78.973.864.461,00**	**74.529.985.007,00**	**94,37 %**
	3. Program peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU)	**66.464.582.300,00**	**+169.154.339.248,00**	**235.618.921.548,00**	**126.960.829.400,00**	**53,88 %**
3. Tercapainya SPM bidang perumahan	4.Program pengembangan perumahan	**2.349.043.830,00**	**-**	**2.349.043.830,00**	**1.973.038.353,00**	**83,99%**

4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an	5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	**12.511.300.800,00**	**+28.984.126.568,00**	**41.495.427.368,00**	**35.000.747.771,00**	**84,35 %**
	6. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	**1.539.208.500,00**	**-**	**1.539.208.500,00**	**1.387.324.288,00**	**90,13 %**
	7. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	**2.378.060.500,00**	**-**	**2.378.060.500,00**	**2.052.131.497,00**	**86,29 %**
	8. Program penataan bangunan gedung	**841.714.259.095,00**	**+17.923.126.977,00**	**859.637.386.072,00**	**729.624.780.936,00**	**84,88 %**
	Dinas	837.912.012.500,00	+17.923.126.977,00	855.835.139.477,00	725.972.762.153,00	84,83 %
	UPTD Wilayah I	3.802.246.595,00	-	3.802.246.595,00	3.652.018.783,00	96,05 %
	9. Program penataan bangunan dan lingkungannya	**89.043.877.441,00**	**+1.442.087.000,00**	**90.485.964.441,00**	**62.148.705.067,00**	**68,68 %**

5. Meningkat nya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	10. Program Pengelolaan sumber daya Air (SDA)	**175.303.168.538,00**	**+31.449.837.468,00**	**206.753.006.006,00**	**186.019.577.128,00**	**89,97 %**
	Dinas	149.094.526.138,00	+30.949.837.468,00	180.044.363.606,00	159.547.226.409,00	88,62 %
	UPTD Wilayah I	10.865.201.900,00	-	10.865.201.900,00	10.852.937.000,00	99,89 %
	UPTD Wilayah II	8.931.260.500,00	+500.000.000,00	9.431.260.500,00	9.408.957.300,00	99,76 %
	UPTD Wilayah III	6.412.180.000,00	-	6.412.180.000,00	6.210.456.419,00	96,85 %
	11. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	**34.000.961.246,00**	**+1.288.371.080,00**	**35.289.332.326,00**	**27.289.303.852,00**	**77,33 %**
	Dinas	27.797.677.746,00	+1.288.371.080,00	29.086.048.826,00	21.103.521.952,00	72,56 %
	UPTD Wilayah II	6.203.283.500,00	-	6.203.283.500,00	6.185.781.900,00	99,72 %
6. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	12. Program penyelenggaraan penataan ruang	**17.591.511.200,00**	**+6.502.016.700,00**	**24.093.527.900,00**	**21.807.005.978,00**	**90,51 %**
7. Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	13. Program pengembangan jasa konstruksi	**12.273.473.400,00**	**+887.291.400,00**	**13.160.764.800,00**	**11.726.048.641,00**	**89,10 %**
	14. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	**123.850.822.193,00**	**+50.883.572.887,00**	**132.405.033.697,00**	**123.641.373.112,00**	**93,38 %**
	Dinas	96.188.496.375,00	+7.211.079.064,00	103.399.575.439,00	95.652.856.379,00	92,51 %
	UPTD Wilayah I	7.706.251.940,00	+121.539.600,00	7.827.791.540,00	7.617.257.260,00	97,31 %
	UPTD Wilayah II	7.044.910.696,00	+273.600.000,00	7.318.510.696,00	7.060.890.315,00	96,48 %

	UPTD Wilayah III	7.165.932.000,00	+542.834.680,00	7.708.766.680,00	7.410.346.189,00	96,13 %
	UPTD Lab Konstruksi	5.745.231.182,00	+405.158.160,00	6.150.389.342,00	5.900.022.969,00	95,93 %
	15. Program penelitian dan pengembangan	**1.115.096.000,00**	**+95.110.000,00**	**1.210.206.000,00**	**1.150.489.942,00**	**95,07 %**
TOTAL BELANJA LANGSUNG DINAS PU + UPTD		**3.076.384.083.142,00**	**+1.015.779.336.265,00**	**4.092.163.419.407,00**	**3.551.598.079.366,00**	**86,79 %**

Tabel 32.Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			KEUANGAN					
						PROGRAM	PAGU ANGGARAN				
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		MURNI	PERUBAHAN (ABT)	TOTAL	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatkan konektivitas antar kawasan	Tingkat kemantapan jalan provinsi	78,27	79,19	101,18	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 1.618.990.948.339,00	Rp 747.782.723.619,00	Rp 2.366.773.671.958,00	Rp 2.146.286.738.394,00	90,68%
2.	Menurunnya luas kawasan kumuh dan jumlah rumah tidak layak huni	Luas Kawasan Kumuh	1.137,82	1.097,20	176,00	Program kawasan permukiman	Rp 77.257.769.760,00	Rp 1.716.094.701,00	Rp 78.973.864.461,00	Rp 74.529.985.007,00	94,37%
						Program peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU)	Rp 66.464.582.300,00	Rp 169.154.339.248,00	Rp 235.618.921.548,00	Rp 126.960.829.400,00	53,88%
3.	Tercapainya SPM bidang perumahan	Skoring Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan	55	73	133,00	Program pengembangan perumahan	Rp 2.349.043.830,00	-	Rp 2.349.043.830,00	Rp 1.973.038.353,00	83,99%
4.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,10	83,10	100,00	Program penyelenggaraan penataan ruang	Rp 17.591.511.200,00	Rp 6.502.016.700,00	Rp 24.093.527.900,00	Rp 21.807.005.978,00	90,51%
5.	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	1.Persentase Capaian Layanan Sumber Daya Air	78,91	92,33	117,00	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Rp 175.303.168.538,00	Rp 31.449.837.468,00	Rp 206.753.006.006,00	Rp 186.019.577.128,00	89,97%
		2. Panjang Saluran Drainase Yang Berfungsi Baik	3.455	3.977,70	115,13	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Rp 34.000.961.246,00	Rp 1.288.371.080,00	Rp 35.289.332.326,00	Rp 27.289.303.852,00	77,33%

2

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			KEUANGAN							
						PROGRAM	PAGU ANGGARAN						
6.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	36,06	41,7	115,64	Program pengembangan jasa konstruksi	Rp 12.273.473.400,00	Rp 887.291.400,00	Rp 13.160.764.800,00	Rp 11.726.048.641,00	89,10%		
7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur keciptakaryaan	Capaian akses air minum layak perpipaan	68,64	73,92	107,69	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rp 12.511.300.800,00	Rp 28.984.126.568,00	Rp 41.495.427.368,00	Rp 35.000.747.771,00	84,35%		
		Capaian akses Penanganan Sampah Domestik	71,37	73,51	103,00	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Rp 1.539.208.500,00	-	Rp 1.539.208.500,00	Rp 1.387.324.288,00	90,13%		
		Capaian akses air Limbah Domestik layak	87,27	83,84	96,07	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp 2.378.060.500,00	-	Rp 2.378.060.500,00	Rp 2.052.131.497,00	86,29%		
		Persentase jumlah gedung dan bangunan lingkungan yang tertata	100,00	100	100,00	Program penataan bangunan gedung	Rp 841.714.259.095,00	Rp 17.923.126.977,00	Rp 859.637.386.072,00	Rp 729.624.780.936,00	84,88%		
						Program penataan bangunan dan lingkungannya	Rp 89.043.877.441,00	Rp 1.442.087.000,00	Rp 90.485.964.441,00	Rp 62.148.705.067,00	68,68%		
						Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Rp 123.850.822.193,00	Rp 50.883.572.887,00	Rp 132.405.033.697,00	Rp 123.641.373.112,00	93,38%		
						Program penelitian dan pengembangan daerah	Rp 1.115.096.000,00	Rp 95.110.000,00	Rp 1.210.206.000,00	Rp 1.150.489.942,00	95,07%		

3
4

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim pada Tahun Anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Rencana kerja pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov.Kaltim merupakan bagian dalam Rencana Strategis tahun 2019-2023, dengan mencakup Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran pada kurun waktu lima tahun. Sasaran dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara

tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pembangunan khususnya di bidang ke-PU-an.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clear Government yang melibatkan Stake Holder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat.

Tim perumus menyadari bahwa Dokumen LKjIP yang disusun ini masih belum sempurna. Untuk itu, saran dan masukan perbaikan untuk lebih sempurnanya laporan ini di masa yang akan datang dapat kami terima demi kemajuan bersama.

Akhirnya, atas kerjasama dan dukungan semua pihak yang telah membantu dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, sehingga Laporan ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat, Tim Perumus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN